

**PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP TINGKAT
KEMISKINAN REGIONAL DI JAWA TIMUR TAHUN 2016-2020**

SKRIPSI



Oleh:

Nama : Fitri Awal Pasholihah

NIM : 18313167

Program Studi : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**

YOGYAKARTA

2022

**PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN
REGIONAL DI JAWA TIMUR TAHUN 2016-2020**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana jenjang
strata 1

Program Studi Ilmu Ekonomi
Pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Fitri Awal Pasholihah

NIM : 18313167

Jurusan : Ilmu Ekonomi



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

YOGYAKARTA

2022

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ilmu Ekonomi FBE UII. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Januari 2022

Penulis



Fitri Awal Pasholihah

PENGESAHAN

PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN REGIONAL DI JAWA TIMUR TAHUN 2016-2020

Oleh:

Nama : Fitri Awal Pasholihah

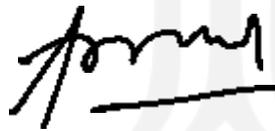
NIM : 18313167

Program Studi : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, 17 Januari 2022

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,



Aminuddin Anwar, S.E., M.Sc

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN
REGIONAL DI JAWA TIMUR TAHUN 2016-2020**

Disusun Oleh : **FITRI AWALU PASHOLIHAN**

Nomor Mahasiswa : **18313167**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari, tanggal: **Rabu, 09 Maret 2022**

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Aminuddin Anwar, S.E., M.Sc.

Penguji : Agus Widarjono, Drs., M.A., Ph.D.

Agus Widarjono

Aminuddin Anwar

Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sembah sujud dan puji syukur kepada Allah SWT atas lindungan dan karunia-Nya telah memberikan kekuatan, keselamatan serta memberikan ilmu tanpa batas. Atas limpahan rahmat yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Tidak lupa Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, semoga kelak dapat berjumpa dan mendapatkan syafaat di hari akhir.

Sebagai tanda hormat, terima kasih yang tidak terhingga dan tandi bakti kupersembahkan karya kecil ini kepada kedua orang tua saya yaitu Bapak Jamadi dan Ibu Siti Juwariyah yang telah memberikan cinta, kasih sayang dan segala dukungan yang tiada terhingga yang tiada mungkin kubalas dan hanya bisa memberikan selebar kertas yang bertuliskan kata cinta kasih sayang dan persembahan. Seluruh keluargaku, sahabat dan teman-teman yang senantiasa meberikan dukungan kepercayaan dan doa yang tulus selalu dipanjatkan untukku.

Terimakasih untuk Almamater tercinta Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia dan Para Dosen dan Staff Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang selama empat tahun telah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk masa depan.

HALAMAN MOTTO

“Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

(QS.Al-Hadid: 4)

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.”

(QS.Al-Mujadilah: 11)

“Man Jadda Wa Jadda, Man Shabara Zhafira, Man Saara Darbi ala Washala.”

(Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil, Siapa yang bersabar akan beruntung, Siapa yang berjalan di jalur-Nya akan sampai).

“Berusahalah untuk tidak menjadi manusia berhasil, tetapi berusahalah untuk menjadi manusia yang berguna.”

(Albert Einstein)

KATA PENGANTAR



Assalamu`alaikum Wr.Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, karunia, serta hidayah-Nya sehingga tugas akhir dengan judul “Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Tingkat Kemiskinan Regional Di Jawa Timur Tahun 2016-2020” ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan harapan. Tidak lupa Sholawat serta salam saya haturkan kepada junjungan saya Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang dan penuh rahmat yang kita rasakan seperti saat ini. Semoga kita dipertemukan oleh Baginda Rasul di hari akhir kelak dengan mendapatkan syafaat yang dinanti-nanti oleh umatNya.

Dalam kesempatan ini, penulis menyadari bahwa tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu berkat doa, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, perkenankan penulis untuk menyampaikan banyak terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. Allah SWT atas berkah rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan kepada penulis selama mengerjakan amanah tugas akhir ini dari awal sampai selesai.
2. Kedua orang tua saya yang sangat saya cintai, Bapak dan Ibu yang senantiasa selalu memberikan semangat doa yang tiada habisnya supaya anaknya menjadi orang yang sukses dan bermanfaat bagi agama, nusa, bangsa dan negara. Atas dukungan dan doa yang selalu dipanjatkan kepada saya, sehingga memberikan saya semangat untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini dan lulus menjadi sarjana ekonomi.
3. Adik kandung saya Abdhol Risky Putro Nyono yang membuat semangat dan menghibur dikala saya mengalami kejenuhan dan rasa malas dalam mengerjakan tugas akhir ini, sehingga saya terdorong untuk lebih rajin dalam mengerjakan skripsi ini. Semoga menjadi anak yang sholih dan sukses untuk bapak dan ibu, keluarga dan negara. Aamiin YRA.
4. Seluruh keluarga besar dan tetangga yang turut mendoakan dan mendukung saya.

5. Bapak Aminuddin Anwar, S.E.,M.Sc. selaku Dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, nasihat, dan bimbingan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu.
6. Ibu Dra.Ari Rudatin M.Si selaku Dosen pembimbing akademik yang telah membantu dalam kegiatan akademis selama saya menimba ilmu di Fakultas bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas islam Indonesia.
8. Bapak Prof.Jaka Sriyana,S.E.,M.Si Ph.D selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
9. Bapak Dr.Sahabudin Sidiq,MA selaku Ketua jurusan prodi ilmu ekonomi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
10. Seluruh Dosen Ilmu ekonomi dan para Staf Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
11. Sahabat-sahabat tersayang Binti, Yusnia, Bunga, Wahyu, Mba Ratna dan Mba Nuril sahabat dari ngaji di madrasah yang selalu menghibur dan mendengarkan curhatan keluh kesahku. Semoga sahabat sampai syurga Aamiin.
12. Teman-teman seperantauanku tersayang di Yogyakarta Widji, Mifta, Shinta, Eni, Ayu, Tiari . Semoga selalu sukses buat kalian.
13. Teman-teman IE angkatan 2018 lainnya yang telah membantu yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu. Terimakasih semuanya.

Demikian kata pengantar yang dapat disampaikan, Penulis sadari skripsi ini banyak kekuarangan dan jauh dari kata sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan semua pihak yang membutuhkan.

Wassalamu`alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, Maret 2022

Penulis

Fitri Awal Pasholihah

DAFTAR ISI

PERSEMBAHAN JUDUL	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
PENGESAHAN	iii
BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Sistematika Penulisan	12
BAB II	13
KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	13
2.1 Kajian Pustaka	13
2.1.1 Penelitian Terdahulu	13
2.2 Landasan Teori	16
2.2.1 Kemiskinan	16
2.2.2 Teori Kemiskinan	19
2.2.3 Indikator Kemiskinan dan Ukuran Kemiskinan	19
2.2.4 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto	20
2.2.5 Pengaruh Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Kemiskinan	21
2.2.6 Indeks Pembangunan Manusia	21

2.2.7 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan	22
2.2.8 Jumlah Penduduk	23
2.2.9 Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Kemiskinan	24
2.2.10 Desentralisasi Fiskal	24
2.2.11 Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Kemiskinan	26
2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis	26
2.4 Hipotesis Penelitian	27
BAB III	28
METODE PENELITIAN	28
3.1 Jenis dan Pengumpulan Data	28
3.2 Definisi Variabel Operasional	28
3.2.1 Variabel Terikat atau Dipengaruhi (<i>Dependent Variable</i>)	28
3.2.2 Variabel Bebas atau Memengaruhi (<i>Independent Variable</i>)	28
3.3 Metode Analisis	29
3.4 Estimasi Model Regresi Data Panel	30
3.5 Pemilihan Model Estimasi	31
3.6 Uji Asumsi Klasik	32
3.7 Uji Statistik	32
BAB IV	35
HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN	35
4.1 Deskripsi Data Penelitian	35
4.1.1 Variabel Terikat (<i>Dependent Variable</i>)	35
4.1.2 Variabel Bebas (<i>Independent Variable</i>)	35
4.2 Hasil Analisis dan Pembahasan	36
4.2.1 Analisis Deskriptif	36
4.2.2 Hasil Pengujian Model Data Panel	37
4.3 Pemilihan Model Terbaik	38
4.3.1 Uji Chow (Chow Test)	38
4.3.2 Uji Hausman (Hausman Test)	39
4.3.3 Uji Lagrange Multiple (<i>Lagrange Multiple Test</i>)	40

4.3.4 Hasil Model Regresi Panel Terbaik	41
4.4 Hasil Uji Asumsi Klasik	42
4.4.1 Uji Normalitas	42
4.5 Hasil Uji Statistik	43
4.5.1 Koefisien Determinasi (R^2)	43
4.5.2 Koefisien Regresi Secara Bersama-sama (Uji F)	43
4.5.3 Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)	44
4.6 Analisis Ekonomi	44
4.6.1 Analisis Pengaruh Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Kemiskinan	44
4.6.2 Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan	45
4.6.3 Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Kemiskinan	46
4.6.4 Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Kemiskinan	46
BAB V	48
KESIMPULAN DAN IMPLIKASI	48
5.1 Kesimpulan	48
5.2 Implikasi	49
DAFTAR PUSTAKA	50
LAMPIRAN	56

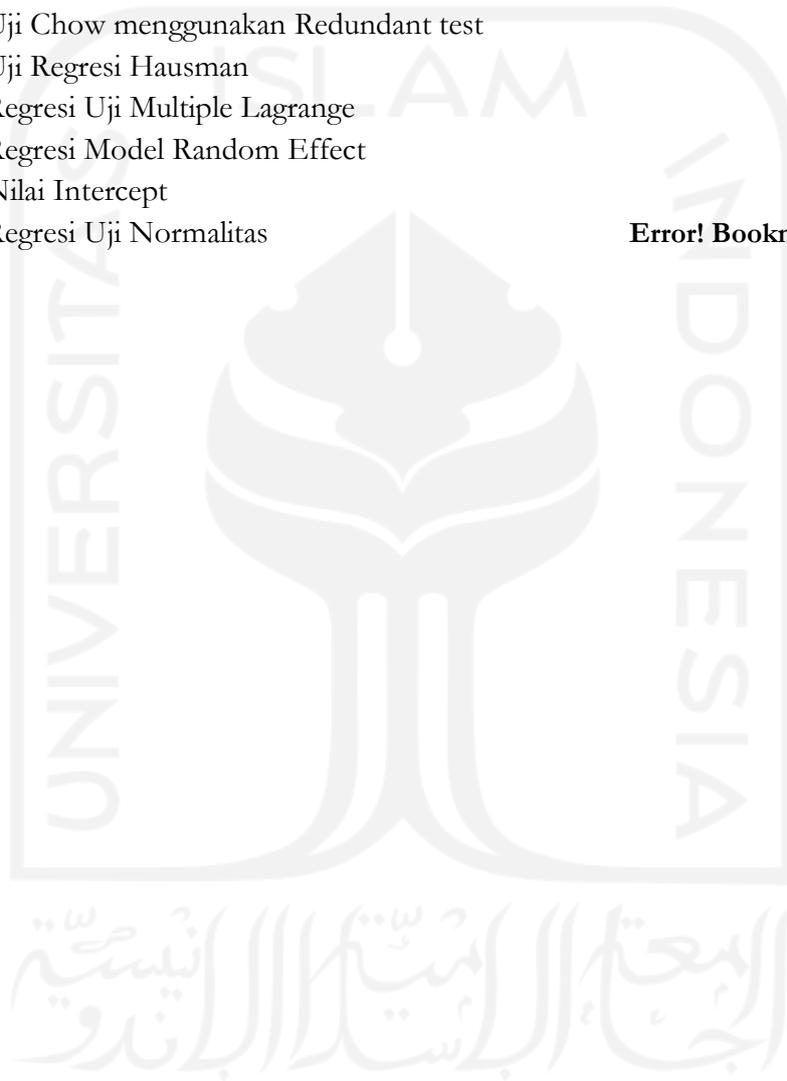
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin menurut kabupaten/kota di Jawa Timur Jawa Tahun 2016 sampai 2020 (Ribu Jiwa)	4
Gambar 1.2 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020	7
Gambar 1.3 Perbandingan PAD per kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 dan 2020 (%)	9
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis	26



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin menurut Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2016-2020 (Ribu Jiwa)	3
Tabel 4.1 Hasil Analisis Deskriptif	36
Tabel 4.2 Hasil Estimasi (Common Effect Model, Fixed Effect Model, dan Random Effect Model)	37
Tabel 4.3 Hasil Uji Chow menggunakan Redundant test	39
Tabel 4.4 Hasil Uji Regresi Hausman	39
Tabel 4.5 Hasil Regresi Uji Multiple Lagrange	40
Tabel 4.6 Hasil Regresi Model Random Effect	41
Tabel 4.7 Hasil Nilai Intercept	42
Tabel 4.8 Hasil Regresi Uji Normalitas	Error! Bookmark not defined.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Perbandingan Jumlah penduduk miskin menurut kabupaten/kota di provinsi Jawa timur tahun 2016 dan 2020	56
Lampiran 2: Perbandingan PAD menurut kabupaten /kota di provinsi Jawa timur tahun 2016 dan 2020	58
Lampiran 3: Data observasi Jumlah penduduk miskin, Laju Pertumbuhan Domestik Regional Bruto (LJPDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Jumlah Penduduk (JP), dan Desentralisasi Fiskal (DF) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur 2016-2020.	60
Lampiran 4: Hasil Analisis Deskriptif	67
Lampiran 5: Hasil Common Effect Model	68
Lampiran 6: Hasil Fixed Effect Model	69
Lampiran 7: Hasil Random Effect Model (REM)	71
Lampiran 8: Hasil Uji Chow	73
Lampiran 9: Hasil Uji Hausman	75
Lampiran 10: Hasil Uji Lagrange Multiple (LM)	77
Lampiran 11: Hasil Uji Normalitas	78

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pengaruh dari desentralisasi fiskal terhadap tingkat kemiskinan regional di kabupaten/kota Jawa Timur. Studi ini menganalisis data pada tingkat kabupaten/kota di Jawa Timur dari periode 2016 sampai 2020. Analisis regresi panel data yang digunakan adalah model *Random Effect Model* (REM). Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah desentralisasi fiskal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan regional di Jawa timur, laju pertumbuhan produk domestik bruto tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan regional di Jawa Timur, indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan regional di Jawa Timur, dan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan regional di Jawa Timur. Jumlah penduduk miskin yang terlampaui tinggi menjadi hal yang rumit untuk menuju proses pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Semua lapisan negara, untuk mengatasi kemiskinan menjadi prioritas utama pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan stabilitas ekonomi. Upaya peningkatan kesejahteraan dapat diimplementasikan melalui kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang baik di setiap daerah regional.

Kata kunci: Desentralisasi fiskal, Pertumbuhan ekonomi regional, Indeks pembangunan manusia, Jumlah penduduk.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan persoalan yang bersifat multidimensi terhadap pembangunan ekonomi. Berbagai dimensi terkait kemiskinan seperti sosial, ekonomi, budaya, politik maupun keterkaitan ruang dan waktu. Kemiskinan merupakan permasalahan yang sudah ada dan identik terjadi di negara berkembang seperti Indonesia. Berdasarkan fakta, saat ini dapat dilihat kemiskinan di Indonesia masih berada di bawah laju kondisi normal sebelum maupun setelah terjadi pandemi. Menurut data dari BPS (2020) melaporkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,55 juta jiwa. Hal ini dapat dikatakan kemiskinan di Indonesia terbilang cukup tinggi. Tingkat keparahan kemiskinan dapat diukur dengan melihat jumlah penduduk miskin yang cukup besar. Salah satu faktor penyebab tingginya jumlah penduduk miskin melalui kondisi investasi, tingkat pengangguran, serta rendahnya pertumbuhan ekonomi. Upaya dalam pengentasan kemiskinan, salah satunya dapat dilakukan secara terpadu dan menyeluruh dari segala aspek kehidupan ikut terlibat serta elemen baik negara maupun masyarakat untuk siap dalam pemulihan ekonomi Cholili (2013).

Kemiskinan menjadi masalah global yang dihadapi berbagai negara di dunia. Oleh karena itu, semua negara memperhatikan masalah ini Todaro et al (2000). Menurut Nugroho dan Dahuri (2004) kemiskinan diartikan sebagai kondisi yang absolut dan relatif di suatu daerah yang menjadi penyebab masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar sesuai norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat karena faktor alamiah (*naturale*), budaya (*culture*), maupun struktural (*structure*). Adapun terdapat 2 sisi kemiskinan yaitu: Pertama, kemiskinan absolut yaitu mendeskripsikan jumlah penduduk yang masih hidup berada di bawah garis kemiskinan tertentu. Kemiskinan absolut terjadi di mana kondisi lemahnya seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok standar minimum. Kedua, kemiskinan relatif yakni di mana pangsa untuk pendapatan secara nasional diterima oleh masing-masing golongan berpendapatan. Selain itu, kemiskinan relatif berada pada kondisi ketidakmampuan mencapai standar hidup yang dilaksanakan

masyarakat setempat dan berkaitan erat dengan masalah distribusi pendapatan Hapsoro, D. N. Y., & Gunanto (2013).

Strategi, program dan kebijakan pembangunan telah dilaksanakan pemerintah dalam mengurangi tingkat laju kemiskinan di Indonesia. Namun, banyak intervensi ataupun program pembangunan dari pemerintah yang telah diterapkan belum mencapai titik maksimal karena banyak pihak seperti masyarakat paling miskin tidak merasakan manfaat secara langsung. Menurut World Bank (2019) menjelaskan ada empat alasan pentingnya pengentasan kemiskinan untuk pembangunan. Pertama, prioritas dalam pembangunan yaitu kemiskinan menurun supaya pengukuran kemiskinan secara akurat dapat menjangkau dengan mudah penduduk miskin bermukim. Kedua, untuk mengidentifikasi penduduk miskin secara mudah. Ketiga, sebagai bahan evaluasi bagi pihak pemerintah terkait program pengentasan kemiskinan. Keempat, sebagai tolok ukur efektivitas lembaga pemerintah dalam penanganan kemiskinan.

Indikator penting yang menjadi patokan keberhasilan pembangunan suatu negara adalah kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Diberbagai negara, untuk menciptakan kemiskinan yang rendah dengan menekan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi yang optimal dan angka kemiskinan menurun adalah tanggung jawab semua negara. Tingginya pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan nilai output produk barang dan jasa yang dihasilkan. Namun, banyak negara berkembang seperti Indonesia pertumbuhan ekonomi yang tercapai faktanya juga diiringi permasalahan jumlah penduduk yang tinggi di bawah garis kemiskinan. Menurut Kuncoro (2000) menyatakan bahwa kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan standar hidup minimal. Di mana, kemiskinan sebagai sumber masalah yang harus dihadapi segera oleh penduduk miskin yang berpenghasilan di bawah rata-rata, bahkan tidak berpenghasilan sekalipun. Adanya ketidaksesuaian kemampuan yang dimiliki penduduk miskin dan akses aktivitas ekonomi terbatas sehingga ada golongan yang tertinggal dari masyarakat yang lainnya.

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang berada di sebelah timur Pulau Jawa. Jawa Timur mempunyai luas wilayah sekitar 47.799,75 km atau setara 2.498 km² luas wilayah Indonesia. Provinsi ini merupakan wilayah terluas di Pulau Jawa di antara 6 provinsi yang memiliki jumlah penduduk tertinggi kedua yaitu sebesar 39,74% setelah Provinsi Jawa Barat.

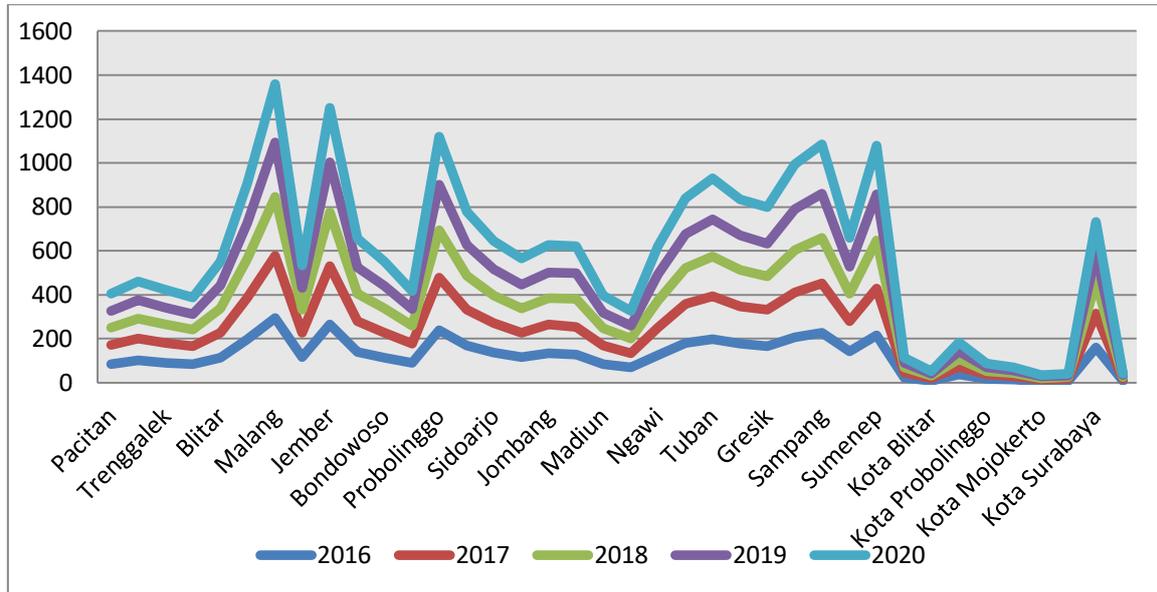
Jawa Timur memiliki 38 kabupaten/kota terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota yang tersebar di provinsi ini. Jumlah penduduk yang semakin meningkat menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur meningkat pula. Menurut data BPS (2019) mencatat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mampu mencapai 5,52% lebih tinggi dibandingkan pendapatan nasional. Jawa Timur menempati posisi pertama penduduk miskin terbanyak sebesar 4.292.150 jiwa BPS (2020). Setiap Provinsi memiliki banyak program akses, fasilitas dan sarana prasarana yang memadai untuk keberlangsungan hidup, namun permasalahan kemiskinan telah menjadi *boomerang* bagi suatu daerah. Berikut data yang menunjukkan jumlah penduduk miskin yang tersebar di Pulau Jawa.

Tabel 1.1 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin menurut Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2016-2020 (Ribuan Jiwa)

Tahun	Provinsi					
	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	DI Yogyakarta	Jawa Timur	Banten
2016	384.3	4 224.3	4 506.89	494.94	4 703.30	658.11
2017	389.69	4 168.44	4 450.72	488.53	4 617.01	675.04
2018	373.12	3 615.79	3 897.20	460.1	4 332.29	661.36
2019	365.55	3 399.16	3 743.23	448.47	4 112.25	654.46
2020	480.86	3 920.23	3 980.90	475.72	4 419.10	775.99

Sumber: Data Badan Pusat Statistik, 2021

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin menyebar di Pulau Jawa khususnya di 6 Provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur dan Banten dari tahun 2016 sampai 2020. Beberapa wilayah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak dan Provinsi Jawa Timur menempati urutan pertama. Kemiskinan yang ada di Jawa Timur tahun 2016 sampai 2020 mengalami fluktuatif meskipun cenderung menurun signifikan setiap tahunnya. Akibat adanya pandemi covid-19 awal tahun 2020 menyebabkan kemiskinan di Jawa Timur kembali naik 11,09% sebelumnya turun secara signifikan di tahun 2019 BPS (2021).



Sumber: Data BPS Jawa Timur, 2021

Gambar 1.1 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin menurut kabupaten/kota di Jawa Timur Jawa Tahun 2016 sampai 2020 (Ribu Jiwa)

Berdasarkan data BPS (2020) menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang sangat ekstrim, hal ini disebabkan adanya pandemi covid yang sangat tinggi dan semakin gencar memengaruhi segala aspek perekonomian termasuk jumlah penduduk miskin yang melonjak dan tingginya tingkat pengangguran pada saat itu. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya di tahun 2016 sampai 2019 jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan yang fluktuatif tetapi tidak banyak. Menurut data dari BPS (2020) melaporkan bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur per bulan september tahun 2020 tercatat ada sebanyak 4.585,97 ribu jiwa atau dalam persentase 11,46%. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 166,9 ribu jiwa dibandingkan pada maret 2020 yang sebelumnya sebesar 4.419,10 ribu jiwa atau 11,09 persen. Jumlah penduduk yang semakin tinggi akan dapat menyebabkan permasalahan penduduk seperti kriminalitas yang merajalela. Dengan demikian, pemerintah memiliki tugas cukup besar dan perlu bergerak cepat untuk mengatasi adanya ledakan jumlah penduduk miskin di suatu daerah yang berdampak pada melambatnya laju percepatan ekonomi di suatu wilayah.

Salah satu program, kebijakan maupun strategi dari pemerintah yang digulirkan seluruh masyarakat miskin seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Covid, PNPM Mandiri dan lainnya telah memberikan hasil, seperti masyarakat miskin yang semakin menurun pada tahun 2016 sampai 2020. Meskipun secara umum jumlah penduduk miskin mulai menurun hingga tahun 2020 namun, jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur masih di atas standar angka kemiskinan dan tergolong cukup besar.

Beberapa penelitian empiris terkait faktor pengaruh tingkat kemiskinan antara lain Putra (2015), Laraswati (2017), dan Wulandari (2018) di tingkat regional kabupaten/kota Jawa Timur. Tingkat kemiskinan yang semakin meningkat timbul karena adanya beberapa faktor seperti laju pertumbuhan produk domestik regional bruto yang rendah, indeks pembangunan manusia yang rendah, pertumbuhan penduduk yang padat, dan pengelolaan keuangan daerah yang kurang optimal sehingga, kemiskinan semakin melonjak. Pengentasan kemiskinan dari daerah ke daerah lain, Pemerintah pusat telah berupaya memberikan kedaulatan kepada pemerintah daerah untuk membantu pembangunan daerah melalui pengelolaan anggaran. Indonesia telah menyiapkan dana yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah terkait kebutuhan dan kepentingan daerah di bawah tanggung jawab pemerintah pusat. Idealnya kewenangan dari pemerintah daerah tersebut dapat berjalan optimal dan sesuai dengan rencana namun, hal tersebut ternyata belum mencapai hasil yang diharapkan. Faktanya, pengelolaan anggaran di setiap daerah banyak bergantung pada bantuan dana dari pemerintah pusat dan gagal dalam melaksanakan pengelolaan anggaran secara optimal termasuk daerah Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data DJPK (2021) mencatat pada tahun 2020 rata-rata derajat desentralisasi fiskal berada pada level sangat kurang sampai dengan cukup dan tertinggi berada di Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo di level sangat baik. Rendahnya sistem desentralisasi fiskal yang telah dilaksanakan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang kurang efektif. Sehingga, hal tersebut akan terjadi inefisiensi dalam pengalokasian anggaran dan kurangnya penerimaan pendapatan pada masing-masing daerah.

Salah satu faktor pengaruh kemiskinan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan nilai bersih seluruh barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh kegiatan perekonomian di suatu wilayah domestik BPS (2021). Menurut Sukirno (2006) pertumbuhan ekonomi merupakan kemajuan kegiatan ekonomi di mana produksi barang dan jasa bertambah

dan kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Pertumbuhan ekonomi sebagai indikator untuk mengetahui tingkat pencapaian suatu pembangunan dan menjadi syarat keharusan (*Necessary condition*) untuk pengentasan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi menjadi elemen penting dalam mengukur kemiskinan. Semakin meningkat PDRB suatu wilayah, maka semakin tinggi potensi sumber pendapatan daerah tersebut Hapsoro, D. N. Y., & Gunanto (2013). PDRB yang rendah menyebabkan adanya ketidakpastian pembangunan di suatu daerah, sebaliknya apabila PDRB tinggi maka pendapatan nasional akan meningkat dan kesejahteraan masyarakat mulai membaik.

Secara umum, perkembangan Provinsi Jawa Timur dapat dilihat dari segi kondisi ekonomi yang diukur melalui Laju Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pasalnya, PDRB Jawa Timur selalu meningkat setiap tahunnya atas dasar data fundamental secara makro ekonomi melalui 5 sektor utama Pertanian, Manufaktur, Perdagangan, Perhotelan, dan Restoran.

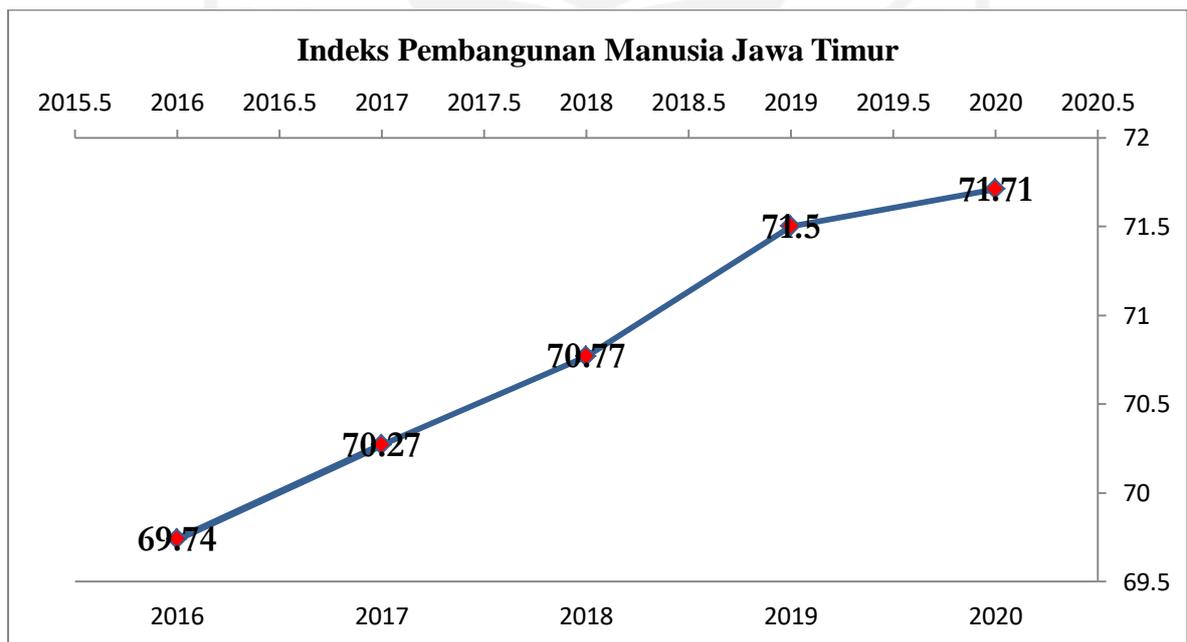
Implikasi tren ekonomi nasional yang terpuruk dapat menurunkan geliat ekonomi dan menurunnya tingkat kinerja di beberapa sektor utama di Provinsi Jawa Timur. Tingginya PDRB diharapkan mampu menciptakan berbagai kondisi yang dibutuhkan untuk pendistribusian hasil pertumbuhan ekonomi serta aspek sosial yang merata. Pendapatan nasional yang tinggi bagian dari proses pembangunan yang selaras dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Pengentasan ekonomi tidak sepenuhnya cukup dengan pertumbuhan ekonomi, namun dengan pertumbuhan ekonomi kemiskinan dapat teratasi dan sangat dibutuhkan. Selain menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, perlu diperhatikan efektivitas dalam pemerataan pendapatan bagi seluruh masyarakat.

Faktor lain penyebab dari kemiskinan yaitu pertumbuhan penduduk yang padat. Pertumbuhan penduduk yang cenderung meningkat tanpa adanya kebijakan perbaikan kualitas sumber daya baik penduduk maupun bahan pangan akan menyebabkan masyarakat miskin semakin tinggi. Adanya jumlah penduduk yang meningkat akan menghambat proses pembangunan ekonomi secara nasional. Jumlah penduduk berkaitan dengan pendapatan perkapita suatu negara, secara kasar menjelaskan perkembangan perekonomian di suatu negara Subri (2013).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga berpengaruh pada kemiskinan. Salah satu unsur dianggap sebagai gambaran dari hasil program pembangunan di tahun sebelumnya yang

telah dilakukan. *Human Development Indeks* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan alat ekonomi untuk mengukur perbandingan dari aspek harapan hidup, angka melek huruf, pendidikan dan standar hidup di seluruh negara. Manfaat pengukuran IPM memberikan klasifikasi apakah negara tersebut negara maju, negara berkembang, bahkan negara terbelakang serta mengukur kebijaksanaan ekonomi untuk memengaruhi kualitas hidup.

Peningkatan indeks pembangunan manusia cenderung sama manfaatnya dengan pendidikan dalam memperbaiki aspek yang berasal dari indikator indeks pembangunan manusia seperti angka harapan hidup, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah maupun bidang kesehatan. Dengan upaya menciptakan tingkat produktivitas yang menjadi lebih baik maka dibutuhkan sarana yang berasal dari bangku sekolah atau pendidikan yang baik serta kepedulian diri terhadap penyakit yang diatasi dalam sektor kesehatan. Dengan daya tahan tubuh semakin kuat serta kemampuan (*skill*) dan pengetahuan (*knowledge*) yang tinggi maka, dipastikan dapat mendorong indeks pembangunan manusia menjadi lebih efektif dan akan dapat bersaing di segala bidang meskipun itu di negara asing.



Sumber: Data BPS Jawa Timur, 2021

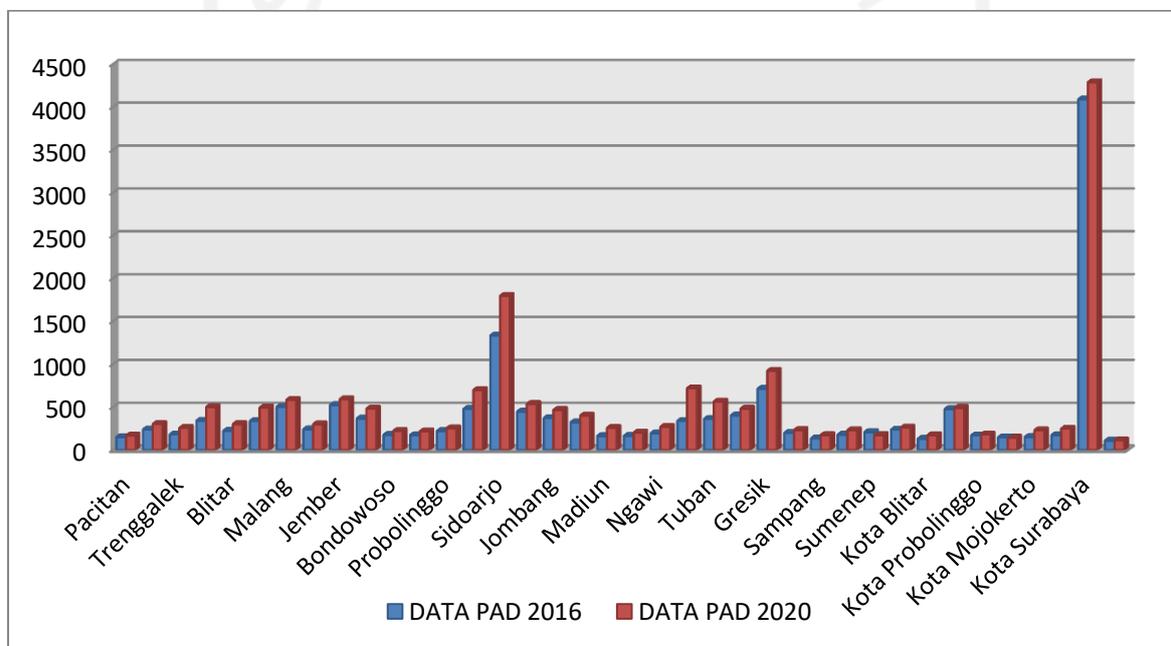
Gambar 1.2 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020 (Persen)

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa tingkat indeks pembangunan manusia Jawa Timur cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2016 indeks Pembangunan manusia sebesar 69,74%, selanjutnya pada tahun 2017 sebesar 70,27% dan cenderung meningkat sampai tahun 2020. Mengutip dari Kompas, menurut Gubernur Jawa Timur melaporkan bahwa tahun 2020 indeks pembangunan manusia di Jawa Timur mulai mengalami peningkatan sejak pandemi sebesar 0,2% tetapi secara keseluruhan masih rendah. Berdasarkan data nasional, IPM Jawa Timur berada di urutan 15 dari 32 provinsi. Ketika IPM mengalami kenaikan, maka laju pertumbuhan ekonomi juga mengalami kenaikan secara signifikan secara kurun waktu tertentu. Namun, ketika IPM meningkat di angka tetap justru laju pertumbuhan ekonomi akan cenderung menurun pada periode tertentu. Dengan demikian, peningkatan indeks pembangunan manusia diharapkan mampu memberi dampak yang lebih baik bagi sumber daya manusia yang berkualitas supaya membantu dalam mengurangi jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur.

Faktor lain yang memengaruhi kemiskinan adalah desentralisasi fiskal. Pada zaman orde baru sebelum reformasi, sistem pemerintahan Indonesia adalah sentralistik. Implikasi sistem terpusat berpengaruh pada kinerja pembangunan yang mengalami ketidaksesuaian kebutuhan dengan kemampuan masyarakat lokal maupun daerah. Kondisi ini akan menimbulkan *net transfer* sumber daya lokal dari pedesaan ke wilayah pusat perkotaan di lokasi kekuasaan seperti Jakarta Dirgantoro, M. A., Mangkuprawira, S., Siregar, H., & Sinaga (2009). Setelah kondisi tersebut, pemerintah telah menerbitkan kebijakan desentralisasi fiskal sesuai revisi Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 mengenai aturan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan otonomi, sejumlah urusan pemerintah diserahkan oleh pemerintah pusat sebagai urusan rumah tangga daerah otonomi kepada pemerintah daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota. Menurut William dan Vyasulu (2004) menjelaskan bahwa dengan desentralisasi fiskal mampu mengurangi kemiskinan menuju ke arah perubahan yang lebih baik dari segi struktur politik dan sikap sosial antara pemerintah terhadap penduduk miskin.

Desentralisasi fiskal merupakan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah wilayah kabupaten/kota untuk mengawasi keuangannya sendiri secara langsung

seperti, menyidik berbagai sumber pendapatan daerah dan menentukan prioritas biaya dalam pembangunan daerah. Di samping itu, pemerintah pusat juga memiliki wewenang yang semakin luas dalam mengelola potensi wilayah daerah sebagai pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, dalam pengelolaan pemerintahan desentralisasi fiskal mampu memberikan kemandirian pada daerah. Upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah seharusnya didorong dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Setiap daerah mempunyai penerimaan pendapatan asli daerah yang berbeda-beda, dan sumber daya alam yang melimpah cenderung berpendapatan asli daerah cukup tinggi dibanding daerah yang lainnya.



Sumber: Data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2021.

Gambar 1.3 Perbandingan PAD per kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 dan 2020 (%)

Gambar 1.3 menunjukkan bahwa perbandingan tingkat PAD yang dicapai pada tahun 2020 mengalami kenaikan signifikan dibandingkan dengan tahun 2016. Namun secara keseluruhan, kontribusi PAD per kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur masih berada di bawah rata-rata stabil. Hal ini menunjukkan bahwa potensi kemampuan pemerintah daerah masih tergolong sangat rendah untuk membantu pembangunan daerah. Tahun 2016 derajat pendapatan asli daerah cenderung sangat rendah yaitu berada di bawah kategori sangat kurang

untuk kontribusi pendapatan asli daerah. Namun, di tahun 2020 mulai membaik dan meningkat berada di level sangat baik meskipun hanya ada di 2 daerah saja yakni kota Surabaya dan kabupaten Sidoarjo. Artinya semakin tinggi pendapatan asli daerah maka pertumbuhan ekonomi akan menunjukkan hasil positif yang signifikan. Wilayah kabupaten/kota provinsi Jawa Timur sebagai daerah yang mampu menunjukkan performa keuangan daerah yang cukup baik pada era desentralisasi fiskal, dengan ditunjukkan kemampuan daerah yang mampu mencapai proporsi pendapatan asli daerah yang tinggi di atas batas rata-rata secara nasional.

Salah satu provinsi dengan kabupaten/kota terbanyak di Indonesia, Jawa Timur memiliki potensi sumber daya terbesar dengan nilai pendapatan daerah yang semakin meningkat di setiap tahunnya. Desentralisasi fiskal akan memberikan dampak positif dalam mengurangi jumlah penduduk miskin apabila disertai meningkatnya pendapatan daerah kabupaten/kota. Selain itu, dengan desentralisasi fiskal mampu menjadi pendorong prospek pertumbuhan ekonomi di daerah otonom. Melalui sistem otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk bertanggung jawab pada sumber anggaran oleh pemerintah pusat sebagai pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, besarnya dukungan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah diharapkan mampu memberikan alokasi pada sumber dana tersebut ke proporsi belanja sesuai kebutuhan utama daerah, sehingga semakin berhasil daerah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan pembangunan daerah yang inklusif.

Berdasarkan penjelasan lengkap terkait latar belakang yang telah diuraikan di atas, persoalan kemiskinan yang ada di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur pada periode tahun 2016 sampai 2020 cenderung mengalami penurunan yang signifikan, namun secara kalkulasi masih tergolong tinggi di atas rata-rata nasional. Jumlah penduduk miskin Provinsi Jawa Timur sangatlah tinggi di mana provinsi ini yang menempati posisi tertinggi kedua tingkat kemiskinan di wilayah Pulau Jawa. Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin di provinsi Jawa Timur mencapai 40 juta jiwa atau persentase sebesar 11,46%. Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor salah satunya kurang perhatian pemerintah dan terkendalanya program maupun strategi pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di provinsi Jawa Timur. Dampak yang terjadi pada perekonomian akan semakin lesu dan memburuk di masa yang akan datang. Dengan demikian, kemiskinan di provinsi Jawa Timur diharapkan mampu menurun di bawah garis kemiskinan

dengan memperhatikan faktor-faktor pengaruh dari kemiskinan seperti pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, Indeks pembangunan manusia, dan derajat desentralisasi fiskal di Provinsi Jawa Timur. Dari Pemaparan di atas, Penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Tingkat Kemiskinan Regional di Jawa Timur Tahun 2016-2020”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal terhadap tingkat kemiskinan regional di Jawa Timur tahun 2016-2020?
2. Bagaimana pengaruh laju pertumbuhan produk domestik regional bruto terhadap tingkat kemiskinan regional di Jawa Timur tahun 2016-2020?
3. Bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan regional di Jawa Timur tahun 2016-2020?
4. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan regional di Jawa Timur tahun 2016-2020?
5. Bagaimana desentralisasi fiskal, laju pertumbuhan produk domestik regional bruto, indeks pembangunan manusia, jumlah penduduk secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan regional di Jawa Timur tahun 2016-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap tingkat kemiskinan regional di Jawa Timur tahun 2016-2020.
2. Menganalisis pengaruh laju pertumbuhan produk domestik regional bruto terhadap tingkat kemiskinan regional di Jawa Timur tahun 2016-2020.
3. Menganalisis pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan regional di Jawa Timur tahun 2016-2020.
4. Menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan regional di Jawa Timur tahun 2016-2020.
5. Menganalisis desentralisasi fiskal, laju pertumbuhan produk domestik regional bruto, indeks pembangunan manusia, jumlah penduduk secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan regional di Jawa Timur tahun 2016-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi para ekonom, menjadi bahan pertimbangan dalam melaksanakan kebijakan khususnya kebijakan ekonomi secara publik yang berkaitan dengan hal kemiskinan.
2. Bagi masyarakat, sebagai salah satu acuan atau sumber informasi terkait kondisi ekonomi regional di Jawa Timur tahun 2016-2020.
3. Bagi penulis, untuk memenuhi syarat kelulusan gelar sarjana program studi ilmu ekonomi, FBE UII.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini supaya mudah dipahami lebih jelas, maka penulis membagi sistematika menjadi lima bab sebagai berikut:

1. Bab 1 Pendahuluan

Bab Pendahuluan berisi uraian tentang latar belakang, masalah penelitian, rumusan masalah, menjelaskan tujuan dan manfaat dari penelitian, serta sistematika penulisan.

2. Bab II Kajian Pustaka dan Landasan Teori

Bab ini menjelaskan mengenai kajian pustaka yang berisi dokumentasi dan kajian hasil dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Dalam bab ini juga membahas teori-teori yang digunakan untuk mendekati permasalahan yang akan diteliti.

3. Bab III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang jenis dan cara pengumpulan data, definisi operasional variabel dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

4. Bab IV Hasil Analisis dan Pembahasan

Bab ini akan memaparkan secara detail deskripsi dari data penelitian dan juga menyajikan hasil analisis serta pembahasannya.

5. Bab V Kesimpulan dan Implikasi

Bab ini akan berisi tentang kesimpulan dari bagian pembahasan yang dilakukan pada bagian sebelumnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Penelitian Terdahulu

Menurut Ilmi (2021) menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah di negara dunia baik negara maju maupun negara berkembang termasuk Indonesia. Peneliti menggunakan metode analisis regresi data panel dengan jangka waktu 2010-2019. Metode yang digunakan yaitu *Fixed Effect Model* (FEM) dengan menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa variabel produk domestik regional bruto, indeks pembangunan manusia dan tingkat pengangguran terbuka memengaruhi tingkat kemiskinan di lima provinsi di Indonesia yaitu (Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Gorontalo).

Penelitian yang dilakukan oleh Romi, S., & Umiyati (2018) menjelaskan bahwa aspek utama dalam menilai kinerja dalam perekonomian dan menganalisis proses pembangunan ekonomi di suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Peneliti ini menerapkan metode analisis regresi data panel dengan jangka waktu 6 tahun. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dari Badan Pusat Statistik. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kota Jambi periode tahun 2010-2015. Namun untuk variabel upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan Kota Jambi periode tahun 2010-2015. Sedangkan hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Aryana dan Finkayana (2016) menjelaskan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bali dalam jangka waktu 2004-2013, dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila setiap ada kenaikan pertumbuhan ekonomi maka variabel tingkat kemiskinan akan berkurang.

Penelitian selanjutnya oleh Kiha, E. K., Seran, S., & Lau (2020) menjelaskan bahwa indeks pembangunan manusia salah satu alat ukur untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari komponen seperti, kesehatan, pendidikan dan standar hidup. Pada

penelitian menerapkan metode analisis jalur (*Path Analysis*) dengan periode waktu 2014-2018. Jenis data yang digunakan adalah menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik kabupaten Belu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk terhadap variabel pengangguran sebesar 0.150, artinya variabel jumlah penduduk dan variabel pengangguran memiliki hubungan yang sangat lemah sehingga tidak signifikan, kemudian variabel jumlah penduduk dan variabel pengangguran terhadap variabel kemiskinan sebesar 0.790 artinya memiliki hubungan yang kuat antar variabel, sedangkan variabel jumlah penduduk, variabel pengangguran dan variabel kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia artinya memiliki hubungan yang kuat antar variabel jumlah penduduk, pengangguran dan kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Belu.

Menurut Khasanah (2021) menjelaskan bahwa indeks pembangunan manusia termasuk dalam faktor yang berpengaruh yang dalam tingkat kemiskinan. Penelitian ini menerapkan metode analisis regresi panel dengan jangka waktu 2013-2019. Metode yang digunakan adalah *Random effect Model* (REM) dan *Generalized Least Square* (GLS) dengan menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa variabel produk domestik regional bruto memiliki hubungan negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan, indeks pembangunan manusia memiliki hubungan negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk memiliki hubungan positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah.

Menurut Sholikhin (2021) salah satu program pemerintah provinsi adalah penurunan jumlah penduduk miskin, sehingga di tahun 2020 di mana ditengah masa pandemi ditargetkan angka kemiskinan di bawah persentase 10 persen. Penelitian ini menerapkan metode analisis regresi panel dengan jangka waktu 2018-2020. Metode yang digunakan *Random Effect Model* (REM) dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persentase penduduk miskin, jumlah penduduk berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap persentase penduduk miskin, produk domestik regional bruto berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persentase penduduk miskin dan dampak adanya pandemi covid-19 berpengaruh positif dan signifikan terhadap persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah.

Penelitian yang dilakukan oleh Abdillah, k. dan Mursianto (2016) menjelaskan bahwa di Indonesia otonomi daerah merupakan bagian bentuk dari proses desentralisasi untuk membangun kabupaten dan kota sebagai daerah otonom. Dengan demikian, sistem desentralisasi adalah konsekuensi logis untuk membantu perbaikan keterbelakangan wilayah Indonesia. Penelitian ini menerapkan metode analisis regresi panel di 33 Provinsi di Indonesia dengan periode waktu 4 tahun. Data yang digunakan adalah data sekunder dari instansi BPS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama dalam jangka pendek desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan sedangkan ketimpangan pendapatan berpengaruh negatif secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan daerah. Dalam jangka panjang, desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan negatif pada tingkat kemiskinan daerah. Sedangkan, ketimpangan pendapatan tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap angka kemiskinan daerah di 33 Provinsi di Indonesia periode 2009-2012.

Penelitian yang dilakukan oleh Sholikhati (2020) menjelaskan bahwa berbagai aspek dalam kemiskinan terdapat saling keterkaitan misalnya tingkat pendapatan yang rendah, angka melek huruf, rendahnya derajat kesehatan dan perbedaan derajat antara jenis kelamin yang berdampak pada lingkungan hidup yang buruk. Pada penelitian menerapkan metode analisis regresi panel dengan periode waktu 2011-2016. Metode yang digunakan *Random Effect Model* (REM) dengan menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel produk domestik regional bruto berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, variabel indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, variabel jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan, variabel tingkat pengangguran berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kemiskinan, dan variabel investasi PMA positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menegaskan bahwa variabel IPM terbukti memiliki hubungan negatif terhadap kemiskinan, artinya bahwa apabila kenaikan nilai IPM sebesar 1% maka akan mengurangi kemiskinan di Jawa Tengah sebesar 0,453134%.

Menurut Wulandari (2018) menjelaskan bahwa salah satu sebab kemiskinan tidak bisa dihindarkan adalah kurang realisasi pada program Keluarga Berencana (KB) yang menyebabkan jumlah penduduk miskin, sehingga akan bertambah beban keluarga untuk kebutuhan hidup

sehari-hari. Penelitian ini menerapkan metode analisis regresi panel dan regresi linear berganda dengan periode waktu 2010-2016. Metode analisis yang digunakan *Random Effect Model* (REM) dengan menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel produk domestik regional bruto dan pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan variabel upah minimum tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan. Namun secara simultan variabel produk domestik regional bruto, pengangguran dan upah minimum sama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di provinsi Jawa Timur tahun 2010-2016.

Penelitian oleh Laraswati (2017) persoalan kemiskinan yang semakin serius harus dihadapi oleh setiap wilayah daerah yang bertujuan untuk pembangunan daerah yang semakin cepat dan lebih baik. Dengan demikian, dibutuhkan eksistensi dari pihak pemerintah daerah dalam mengupayakan kemiskinan. Penelitian ini menerapkan metode analisis regresi panel dengan periode waktu 2010-2015. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dari Badan Pusat Statistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa baik secara simultan maupun parsial variabel desentralisasi fiskal, pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan penduduk memiliki hubungan negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2015.

Penelitian yang menganalisis determinan yang memengaruhi tingkat kemiskinan yang dilakukan oleh Enrian (2021) di Provinsi Riau periode 2013 sampai 2019. Menggunakan metode *Fixed Effect Model* (FEM) dengan variabel yang memengaruhi yaitu laju pertumbuhan produk domestik regional bruto, indeks pembangunan manusia, jumlah penduduk, pendidikan, belanja daerah, dan tingkat pengangguran. Pada penelitian ini menyimpulkan bahwa variabel yang memiliki hubungan negatif dan signifikan adalah variabel laju pertumbuhan produk domestik regional bruto, indeks pembangunan manusia. Namun untuk belanja daerah berpengaruh secara tidak signifikan terhadap kemiskinan, selanjutnya untuk variabel tingkat pengangguran, jumlah penduduk memiliki hubungan positif secara signifikan, sedangkan untuk variabel pendidikan berpengaruh secara tidak signifikan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu masalah yang sangat krusial yang hampir dialami oleh seluruh negara, termasuk Indonesia. Peralannya tidak hanya tren yang semakin meningkat dan timbul konsekuensi yang tidak hanya dari ruang lingkup ekonomi saja, namun ada masalah sosial ataupun ketidaksesuaian politik dalam suatu negara. Sehingga, untuk pengentasan masalah kemiskinan adalah prioritas utama untuk pembangunan ekonomi dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu, kemiskinan juga suatu kondisi di mana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan secara layak dan sulit memperoleh hidup yang berkualitas sesuai dengan kemanusiaan. Oleh karena itu, kemiskinan disebut juga ketidakmampuan dalam memperoleh kebutuhan standar hidup minimum, yang diukur berdasarkan tingkat konsumsi. Menurut Kuncoro (2000) berdasarkan pengukuran konsumsi, terdapat dua unsur untuk melihat garis kemiskinan yaitu pertama, konsumsi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan standar gizi minimum serta kebutuhan dasar lainnya. Kedua, banyaknya kebutuhan yang beragam sesuai dengan biaya partisipasi dalam lingkungan masyarakat sehari-hari.

Menurut Chamber (2010) kemiskinan adalah konsep integrasi yang terdiri lima elemen kemudian elemen tersebut akan membentuk suatu perangkat kemiskinan (*deprivation trap*) yaitu:

1. Kemiskinan itu sendiri
2. Ketidakberdayaan
3. Kerentanan menghadapi situasi yang darurat
4. Ketergantungan
5. Keterasingan baik secara geografis maupun sosiologis.

Menurut Suryawati (2005) kemiskinan bukan saja hanya dianggap sebagai ketidakmampuan seseorang terhadap kekayaan dan pendapatan yang dihasilkan, namun juga dilihat dari segi non ekonomi yakni pendidikan yang berkualitas dan kesehatan yang baik. Selain itu, tidak memperoleh sikap keadilan di ranah hukum sehingga menciptakan maraknya tindakan kriminal yang disebabkan dari kekurangan individu dalam menuntun hidup sendiri.

Kemiskinan dibedakan menjadi 4 bentuk yaitu:

a. Kemiskinan Absolut

Suatu kondisi di mana seseorang hanya memperoleh pendapatan minimum di bawah garis kemiskinan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan perumahan untuk kehidupan maupun bekerja. Kendala utama dalam pengukuran kemiskinan secara absolut yaitu menentukan komposisi dan jumlah kebutuhan minimum sehingga, tidak hanya pengaruh adat istiadat saja, namun juga dari keadaan iklim ataupun segi ekonomi lainnya.

b. Kemiskinan Relatif

Kondisi di mana individu mengalami kemiskinan akibat dari dampak ketidakmerataan kebijakan dalam hal pembangunan yang dilaksanakan pihak pemerintah, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan masyarakat.

c. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan ini mengacu pada sikap perilaku seseorang atau masyarakat akibat dari faktor kultur atau budaya. Misalnya, seseorang enggan untuk memperbaiki kualitas kehidupan, hanya mengedepankan sifat malas dan egois, menghabiskan finansial ke dalam hal tidak berguna, dan walaupun mendapat bantuan dari pihak luar minimnya sikap kreatif dan inovatif untuk menciptakan sesuatu hal yang baru.

d. Kemiskinan Struktural

Kondisi kemiskinan timbul akibat rendahnya tingkat akses sumber daya pada sistem non ekonomi yaitu sosial dan politik di mana kurangnya dukungan untuk pembebasan dalam kemiskinan. Oleh karena itu, bukan mengurangi jumlah penduduk miskin justru semakin membuat kemiskinan meningkat.

Selain bentuk kemiskinan, terdapat beberapa jenis kemiskinan berdasarkan sifatnya. Adapun jenis kemiskinan berdasarkan sifatnya yaitu:

1. Kemiskinan Alamiah

Situasi pada kemiskinan ini berkaitan dengan sumber daya alam yang langka dan terbatas dan kurangnya sarana prasarana fasilitas umum seperti jalan raya, ketersediaan listrik, dan sumber air bersih, serta kondisi tanah yang kurang baik dan tidak subur untuk bercocok tanam. Karakteristik tersebut secara umum ditemukan pada daerah yang belum

mendapatkan kebijakan pembangunan oleh pemerintah, akibatnya menjadi daerah tertinggal.

2. Kemiskinan Buatan

Kemiskinan ini berkaitan dengan persoalan sistem modernisasi atau pembangunan yang menyebabkan masyarakat kurang dalam menguasai sumber daya, sarana prasarana, ataupun fasilitas ekonomi secara menyeluruh dan merata.

Menurut Kuncoro (2000) penyebab kemiskinan sebagai berikut:

1. Kemiskinan secara mikro, merupakan kemiskinan yang timbul karena adanya perbedaan pola pikir terkait sumber daya yang dimiliki. Oleh karena itu, hal tersebut akan mengakibatkan ketimpangan pada distribusi pendapatan dan penduduk miskin akan bergantung pada sumber daya yang tersedia saja dengan jumlah terbatas dan rendahnya kualitas.
2. Kemiskinan yang muncul akibat ketidaksamaan kualitas sumber daya manusia. Pentingnya kualitas sumber daya manusia seperti, keterampilan, bidang keahlian, dan pengetahuan sangat berpengaruh dalam menekan jumlah kemiskinan karena hasil tergantung pada kualitas. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia maka tingkat produktivitas akan tinggi dan upah juga akan ikut tinggi. Sebaliknya, apabila kualitas sumber daya manusia rendah maka tingkat produktivitas yang dihasilkan akan menurun dan upahnya pun rendah.
3. Kemiskinan timbul sebab ketidaksamaan mendapatkan akses dan meraih modal akibat dampak dari teori lingkaran setan kemiskinan. Tingkat akses yang terbatas dan bahkan tidak ada akses sekalipun, manusia akan terbatas pula pilihan untuk mengembangkan hidupnya, sehingga menghambat potensi manusia untuk memperbaiki kehidupannya.

2.2.2 Teori Kemiskinan

Menurut Nurwati (2008) kemiskinan merupakan persoalan sosial di mana selalu ada di kehidupan masyarakat. Berdasarkan waktu, masalah kemiskinan membutuhkan banyak pertimbangan untuk menyelesaikannya, sama halnya dengan jumlah usia manusia itu sendiri terkait segala bentuk ataupun karakter kehidupan. Oleh karena itu, kemiskinan dapat dikatakan masalah yang bersifat global atau mendunia di mana telah menjadi perhatian di semua negara.

Selain itu, kemiskinan tidak lepas dari masalah ketimpangan dan rentan pada pendapatan yang rendah, sehingga individu yang semula berpendapatan tinggi akan jatuh miskin karena masalah finansial maupun rendahnya harga untuk hasil panen petani menurut Haughton, J., & Khandker (2012).

Menurut BPS (2016) menjelaskan bahwa persoalan kemiskinan merupakan ketidakmampuan individu dalam hal ekonomi, materi dan fisik dalam memenuhi kebutuhan pokok baik makanan, sandang ataupun papan yang dilihat dari tingkat konsumsi. Alat ukur kemiskinan ada 2 yakni Garis Kemiskinan Makanan (GKM) yang dilihat dari jumlah konsumsi yang berasal dari nilai kebutuhan minimum makanan yang terhitung sebesar 2.100 kalori per kapita dalam sehari, dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) yang dilihat dari jumlah kebutuhan minimum untuk hal pakaian, pendidikan kesehatan maupun kebutuhan dasar lainnya.

2.2.3 Indikator Kemiskinan dan Ukuran Kemiskinan

Kemiskinan dapat ditentukan dengan cara perhitungan *Head Count Index*, yaitu persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan BPS (2016) adalah:

- a. Indeks Kedalaman Kemiskinan (p_1) merupakan alat ukur untuk nilai pengeluaran penduduk miskin terhadap tingkat kemiskinan. Apabila semakin tinggi nilai indeks maka rata-rata pengeluaran penduduk akan menjauhi garis kemiskinan.
- b. Indeks Keparahan Kemiskinan (p_2) merupakan alat ukur untuk pengeluaran yang menyeluruh dan merata di antara penduduk miskin. Apabila semakin tinggi nilai indeks maka pengeluaran penduduk miskin juga akan tinggi.

Menurut Arsyad (2010) kemiskinan dapat diukur berdasarkan:

a. Indikator Tingkat Konsumsi Beras

Melihat berdasarkan tiga kategori yaitu sangat miskin, miskin, nyaris miskin, dapat diukur dengan menghitung berapa banyak tingkat pengeluaran konsumsi beras perkapita dalam setahun.

b. Indikator Tingkat Pendapatan

Tingkat pendapatan dapat diukur dari pendapatan perkapita dan melalui garis kemiskinan jumlah penduduk miskin dapat dihitung pengeluaran per hari sebesar 1 dollar Amerika, sehingga apabila ukurannya 2 dollar per hari maka tergolong miskin.

2.2.4 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

Menurut BPS (2013) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah tambahan nilai yang dihasilkan baik barang dan jasa dari seluruh unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian, laju produk domestik regional bruto diartikan suatu tingkat pertumbuhan yang diperoleh dari barang dan jasa dalam suatu wilayah pada periode waktu tertentu. Manfaat dari Laju PDRB yakni, menjadi alat ukur kemajuan dalam ekonomi untuk menggambarkan kondisi pembangunan daerah perkotaan. Selain itu, dengan Laju PDRB dapat menjadi acuan dasar dalam membuat keputusan untuk memproyeksikan pendapatan negara untuk rencana pembangunan nasional, regional maupun sektoral. Rumus pada persamaan penjualan, di mana laju PDRB menjadi acuan prakiraan dalam pembentukan bisnis usaha.

$$\text{Laju PDRB dapat dirumuskan sebagai berikut: } \frac{\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}}{\text{PDRB}_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

PDRB_t = PDRB tahun tertentu

PDRB_{t-1} = PDRB tahun sebelumnya

Indikator turunan dari PDRB melalui pengukuran laju pertumbuhan PDRB terdapat sumber data yang selaras dengan PDRB dan variabel yang diperoleh sejalan dengan pendekatan untuk alat ukur PDRB. Untuk penyajian data PDRB, terdapat dua macam cara penyajian yakni:

1. PDRB atas dasar harga berlaku

Menunjukkan perhitungan nilai tambah produksi, biaya antar dan nilai tambah lainnya dari barang dan jasa dengan melihat dari harga pada tahun berjalan.

2. PDRB atas dasar harga konstan

Menggunakan acuan harga konstan atau tahun dasar untuk menghitung nilai tambah barang dan jasa seperti nilai produksi, biaya antar, dan komponen nilai tambah yang lain.

2.2.5 Pengaruh Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Kemiskinan

Definisi produk domestik regional bruto secara teori hampir sama dengan definisi laju produk domestik regional bruto di mana laju pertumbuhan PDRB memiliki keterkaitan terhadap kemiskinan sama halnya dengan PDRB terhadap kemiskinan. Secara umum, PDRB adalah jumlah seluruh nilai output barang dan jasa yang diperoleh pada suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Menggunakan alat ukur uang atas harga pasar yang berlaku, produksi barang dan jasa melalui PDRB dapat diketahui pergerakan naik atau turunnya perekonomian suatu wilayah.

Laju produk domestik regional bruto menjelaskan nilai akhir suatu barang dan jasa yang mengalami kenaikan dan penurunan berasal dari suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, dianggap dapat menentukan nilai PDRB yang nantinya akan berpengaruh pada perekonomian di suatu daerah. Semakin tinggi laju pertumbuhan PDRB maka nilai PDRB pun juga akan ikut tinggi, sehingga pada daerah tersebut akan mengalami kemajuan dibandingkan tahun sebelumnya. Perekonomian yang semakin trend dan maju menandakan bahwa kemiskinan di suatu daerah tersebut mengalami penurunan. Dengan demikian, laju pertumbuhan PDRB yang semakin meningkat, maka jumlah penduduk miskin akan berkurang sejalan dengan pelaksanaan pembangunan wilayah kabupaten/kota yang berhasil menciptakan prakiraan dan perencanaan pendapatan pembangunan baik sektoral, regional maupun nasional.

2.2.6 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) didefinisikan sebagai ukuran untuk mengetahui dampak kinerja pembangunan di suatu wilayah yang menunjukkan besarnya kualitas penduduk suatu wilayah dalam angka harapan hidup, intelektualitas dan kelayakan standar untuk hidup. Dengan kata lain, dalam merencanakan pembangunan indeks pembangunan manusia memberikan tuntunan prioritas secara pasti untuk perumusan kebijakan dan menentukan program berkelanjutan.

Menurut BPS (2009) indeks pembangunan manusia digunakan untuk mengukur besarnya pencapaian dalam hal pembangunan manusia yang dilihat berdasarkan komponen-komponen dasar hidup yang berkualitas. Adapun komponen yang dimaksud yakni pertama, bidang kesehatan disebut juga angka harapan hidup yang diukur dari harapan usia panjang dan sehat

dengan menghitung berdasarkan prakiraan rata-rata jumlah tahun yang sudah dilalui individu semasa hidupnya. Kedua, bidang pendidikan yang diukur dari tingkat partisipasi sekolah dan rata-rata lama pendidikan, dan angka melek huruf. Ketiga, rata-rata pengeluaran perkapita yang diukur berdasarkan kemampuan masyarakat dalam daya beli terhadap kebutuhan pokok sehari-hari.

Indeks pembangunan manusia memiliki peran dan kedudukan dalam pembangunan yang semakin terlihat apabila disertai dengan data yang relevan dan lengkap. Dengan demikian, sistem data yang lengkap dan akurat akan mempermudah dalam pengkajian berbagai jenis hambatan serta dapat menjadi implementasi program pembangunan di tahun sebelumnya dan peluang yang dimiliki oleh suatu wilayah sebagai masukan perencanaan pembangunan di tahun selanjutnya. Nilai indeks pembangunan manusia yang digunakan menjadi tolok ukur dalam pembangunan yang menggambarkan situasi dan kondisi kemiskinan masyarakat yang sebenarnya.

2.2.7 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan

Hubungan tingkat pendapatan dengan indeks pembangunan manusia memiliki keterkaitan yang luas. Namun, semakin tinggi tingkat pendapatan yang diperoleh maka tidak secara otomatis meningkatkan indeks pembangunan manusia. Hal tersebut terjadi sebab sumber daya dari pertumbuhan ekonomi yang tidak berfungsi memperbaiki elemen-elemen yang lain untuk mendorong indeks pembangunan manusia meningkat. Dengan demikian, indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh yang kuat terhadap kemiskinan, di mana adanya pembangunan manusia untuk memberikan pilihan yang luas pada individu dengan memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari meliputi: faktor pendidikan, kesehatan dan kebutuhan untuk hari selanjutnya. Perbaikan untuk faktor pendidikan maupun kesehatan akan memberikan dampak positif bagi indeks pembangunan manusia.

Berdasarkan aset, penduduk miskin yang memperbaiki tingkat pendidikan dan kondisi kesehatannya akan membantu meningkatkan produktivitas, sehingga secara langsung pendapatan masyarakat yang tergolong miskin akan meningkat. Semakin baik pencapaian indeks pembangunan manusia maka kualitas sumber daya manusia akan baik pula, sebaliknya semakin rendah indeks pembangunan manusia maka kualitas sumber daya manusia yang dicapai akan menurun pula. Pertimbangan dari tiga komponen yakni angka harapan hidup, bidang pendidikan dan kelayakan standar hidup. Indeks pembangunan manusia sangat berperan penting dalam

menggambarkan suatu negara atau daerah untuk menghadapi teknologi yang semakin canggih dengan memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang lebih baik untuk hasil akhir yaitu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia di suatu wilayah.

2.2.8 Jumlah Penduduk

Menurut Zurisdah (2016) penduduk merupakan seluruh individu yang menempati suatu wilayah baik dari negara domestik ataupun negara asing. Sedangkan menurut Kartomo (1986) penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah tertentu. Dengan kata lain, penduduk adalah mereka yang memiliki tempat tinggal dalam suatu wilayah yang terlepas dari status warga negara atau bukan warga negara asli. Definisi jumlah penduduk merupakan orang-orang yang bertempat tinggal di suatu negara atau wilayah yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan berinteraksi satu sama dengan yang lain secara langsung. Secara langsung banyaknya jumlah penduduk belum menentukan sebagai modal pembangunan, bahkan sebaliknya dapat menjadi beban bagi penduduk lainnya. Kenaikan jumlah penduduk akan berdampak standar hidup semakin menurun dan apabila jumlah angkatan kerja mengalami kenaikan maka akan menciptakan standar hidup yang lebih baik. Namun, apabila jumlah angkatan kerja rendah maka pendapatan juga ikut menurun yang mengakibatkan standar kehidupan melemah dan kemiskinan akan tinggi sebab modal yang sangat minimal untuk kelangsungan hidup ataupun bekerja.

Secara umum, definisi jumlah penduduk adalah individu-individu yang tergabung dalam suatu wilayah geografis Indonesia berdasarkan waktu kurang atau sama dengan enam bulan yang tujuannya untuk bermukim atau menetap. Menurut Sudarsono (1983) terdapat tiga faktor dalam memengaruhi pertumbuhan penduduk yakni:

1. Kelahiran (Fertilisasi)

Suatu proses pertumbuhan penduduk yang berhubungan dengan jumlah kelahiran bayi yang hidup atau dilihat dari jumlah anak yang dapat memengaruhi jumlah pertumbuhan penduduk.

2. Kematian (Kematian)

Situasi di mana berkurangnya jumlah penduduk atau kondisi hilangnya tanda kehidupan individu yang dimiliki yang terjadi di mana dan kapan saja, yang terjadi setelah kelahiran.

3. Migrasi

Perpindahan penduduk dari suatu tempat ke wilayah lain yang bertujuan untuk menetap ke tempat yang dipilihnya, sehingga pindah tempat tersebut bersifat relatif permanen di mana setiap individu memiliki alasan terkait hal itu, misalnya alasan pendorong dan penarik untuk bermigrasi. Sehingga, untuk berpindah tempat seseorang harus melewati pembatas politik suatu negara dan pembatas administratif yang berlaku.

2.2.9 Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Kemiskinan

Laju penduduk yang tinggi terjadi karena bertambahnya pertumbuhan penduduk yang sangat besar dilihat dari angka kelahiran, kematian maupun dari perpindahan penduduk. Kepadatan penduduk disebabkan karena jumlah penduduk yang sangat tinggi, sehingga pembangunan ekonomi tidak mudah untuk dikendalikan. Dengan demikian, jumlah penduduk akan memengaruhi kemiskinan dengan berdampak sulitnya negara untuk menciptakan kesejahteraan di lingkungan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh sulitnya para tenaga kerja mencari lapangan pekerjaan bahkan masalah yang tergolong intens seperti, pentingnya pendidikan dan kesehatan.

Hambatan dalam mengendalikan jumlah penduduk secara besar akan lebih sulit dibanding jumlah penduduk yang sedikit. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya pemerintah seperti kebijakan, strategi, program maupun anggaran dana yang cukup untuk menanggulangi seluruh penduduk tanpa ada unsur ketidakadilan dan ketidakseimbangan. Peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk megimbangi seluruh penduduk yang jumlahnya semakin melonjak setiap tahunnya kemudian pemerintah juga harus bekerja secara ekstra supaya tidak muncul masalah seperti pengangguran, pendidikan, kesehatan dan ketersediaan bahan pangan yang minim untuk menghindari masalah kelaparan yang justru akan memperparah kemiskinan.

2.2.10 Desentralisasi Fiskal

Menurut Saragih, J. P., & Khadafi, (2003) desentralisasi fiskal merupakan suatu distribusi anggaran yang diproses dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk membantu pemerintahan dalam bertugas dan berfungsi dalam pelayanan publik sesuai dengan jumlah wewenang di bidang pemerintahan yang telah diserahkan. Prinsip yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal yaitu prinsip *money should follow function*, artinya setiap penyerahan

wewenang oleh pemerintahan akan membawa dampak pada anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan wewenang tersebut. Dalam melaksanakan kebijakan perimbangan keuangan pusat daerah yang bersifat derivatif dari kebijakan otonomi daerah yang melimpahkan sebagian wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, sehingga pelimpahan wewenang yang semakin meningkat akan cenderung membutuhkan anggaran yang tinggi pula. Selain prinsip tersebut, dalam mengelola anggaran harus menerapkan prinsip efisiensi dalam mengelola biaya, sehingga untuk pelaksanaan tugas pemerintah maupun dalam melayani publik anggaran dikelola secara efisien mungkin namun, tetap menghasilkan output yang maksimal.

Menurut UU Nomor.32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal berisi tentang wewenang yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom bertujuan untuk mengatur serta mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan keuangan secara mandiri yang diatur sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Menurut Ebel, R. D., & Yilmaz (2002). Ada tiga macam desentralisasi berdasarkan derajat kemandirian daerah yakni:

1. *Deconcentration*

Suatu pelimpahan kewenangan yang berasal dari pihak pemerintah pusat ibukota negara kepada pihak pemerintah daerah.

2. *Delegation*

Kegiatan dengan sistem penunjukan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terkait tugas pemerintahan kepada pemerintah daerah yang berada di bawah tanggung jawab pemerintah pusat.

3. *Devolution*

Berisi tentang penyerahan urusan terkait fungsi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebab daerah memiliki kewenangan untuk mengelola penerimaan pendapatan maupun pengeluaran di daerah masing-masing

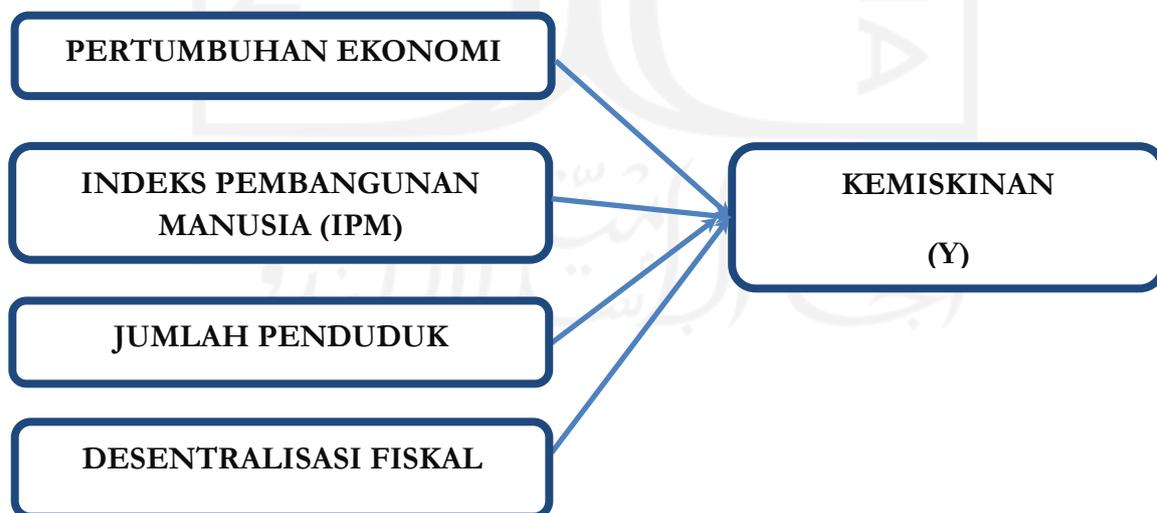
Strategi ekonomi melalui desentralisasi akan berjalan lancar apabila memenuhi faktor-faktor kelembagaan yang dilaksanakan secara baik. Dengan kata lain, desentralisasi dapat diartikan sebagai *rules of the game* bagi pemerintah lokal untuk membantu perekonomian daerah yang lebih baik, sehingga berhasil tidaknya desentralisasi tergantung sistem kelembagaannya baik secara mikro maupun makro. Apabila tujuannya secara makro, maka penyusunan kelembagaan

ekonomi yang efisien menjadi tugas pemerintah lokal untuk sarana investasi dan fokus kepada kebijakan terkait batas eksploitasi pelaku ekonomi terhadap pelaku ekonomi lainnya Yustika (2006). Namun, apabila desentralisasi fokus konsentrasi terhadap pengeluaran publik, maka akan berpengaruh langsung terhadap produk domestik regional bruto, di mana menggambarkan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Pengeluaran untuk infrastruktur maupun sektor sosial dari pemerintah daerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dibandingkan kebijakan pemerintahan pusat. Oleh karena itu, daerah memiliki keutamaan dalam pembuatan anggaran pembelanjaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang lebih efisien.

2.2.11 Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Kemiskinan

Secara umum, suatu rencana atau program yang menjadi prioritas pemerintah daerah yaitu mengurangi angka kemiskinan. Dengan demikian, pengelolaan desentralisasi fiskal yang optimal sangat diperlukan supaya secara cepat respon pemerintah terkait kebutuhan pokok yang diperlukan masyarakat miskin, misalnya kebutuhan pendidikan dan kesehatan yang memadai. Dampak desentralisasi fiskal secara langsung dan tidak langsung disebabkan oleh tinggi rendahnya tingkat kemiskinan, terutama desentralisasi pengeluaran di mana peran pemerintah diperlukan melalui kebijakan yang dilaksanakan dan alokasi anggaran secara efektif dan efisien untuk mengurangi angka kemiskinan Hutabarat (2016).

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian adalah perkiraan atau dugaan yang bersifat sementara dari sebuah penelitian yang berikutnya akan dibuktikan kebenarannya dengan menggunakan alat analisis dan menguji data secara empiris. Hasil hipotesis yang ditentukan tidak selalu benar adanya karena bersifat dugaan, oleh karena itu dapat dimungkinkan salah ataupun benar adalah seimbang. Dengan pertimbangan dari pemikiran dasar baik secara teoritis dan studi empiris yang dilakukan sebelumnya yang memiliki hubungan dengan penelitian ini sehingga, hipotesis terdiri dari sebagai berikut:

1. Diduga variabel desentralisasi fiskal berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan regional di Jawa Timur tahun 2016 sampai 2020.
2. Diduga variabel laju pertumbuhan produk domestik regional bruto berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan regional di Jawa Timur tahun 2016 sampai 2020.
3. Diduga variabel indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan regional di Jawa Timur tahun 2016 sampai 2020.
4. Diduga variabel jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan regional di Jawa Timur tahun 2016 sampai 2020.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif karena dalam bentuk bilangan atau angka. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian adalah gabungan antara data *cross section* sebanyak 38 kabupaten/kota atau terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota di Provinsi Jawa Timur dengan data *time series* selama 5 tahun dari tahun 2016 sampai 2020. Data yang digunakan adalah laju pertumbuhan produk domestik regional bruto, jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia dan desentralisasi fiskal di provinsi Jawa Timur terhadap tingkat kemiskinan regional di Jawa Timur.

3.2 Definisi Variabel Operasional

Variabel merupakan individu dalam bentuk apa saja yang digunakan oleh peneliti untuk dianalisis sehingga akan memperoleh informasi tentang makna tersebut, penelitian ini menggunakan 2 jenis variabel yaitu variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi (*Dependent Variable*) dan variabel bebas atau variabel memengaruhi (*Independent Variable*). Dalam penelitian terdiri dari 4 variabel bebas (independen) dan variabel terikat (Dependen). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah jumlah kemiskinan, sedangkan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah produk domestik regional bruto (PDRB), indeks pembangunan manusia (IPM), jumlah penduduk dan desentralisasi fiskal. Dengan demikian, untuk mempermudah pemahaman terkait variabel-variabel yang telah ditetapkan akan dianalisis oleh peneliti.

3.2.1 Variabel Terikat atau Dipengaruhi (*Dependent Variable*)

- Kemiskinan

Kemiskinan merupakan kondisi di mana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup secara layak, dan ketika seseorang memiliki pengeluaran perkapita di bawah batas garis kemiskinan. Data untuk variabel tingkat kemiskinan yang digunakan oleh peneliti adalah data jumlah penduduk miskin pada 38 kabupaten/kota Jawa Timur dalam jangka waktu tahun 2016-2020 (dalam ribu jiwa).

3.2.2 Variabel Bebas atau Memengaruhi (*Independent Variable*)

- Laju pertumbuhan produk domestik regional bruto

Laju pertumbuhan produk domestik regional bruto dalam penelitian ini menggunakan data perkembangan jumlah nilai barang dan jasa akhir dalam suatu daerah sebagai analisis pembangunan regional. Data variabel produk domestik regional bruto berdasarkan harga konstan provinsi Jawa Timur dengan jangka waktu tahun 2016 sampai 2020 (dalam persen).

- Indeks pembangunan manusia

Indeks pembangunan manusia merupakan gambaran kualitas kehidupan masyarakat yang terdiri dari komponen seperti angka harapan hidup, angka partisipasi sekolah, rata-rata lama sekolah, angka melek huruf dan rata-rata pengeluaran perkapita atau kebutuhan dasar masyarakat. Data yang digunakan adalah variabel indeks pembangunan manusia yang diambil dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur dengan jangka waktu tahun 2016-2020 (dalam persen).

- Jumlah penduduk

Jumlah penduduk adalah suatu faktor yang penting dalam suatu negara. Jumlah penduduk yang padat disebabkan oleh tiga faktor yakni fertilisasi (kelahiran), mortalitas (kematian), dan migrasi. Data variabel yang digunakan adalah jumlah penduduk provinsi Jawa Timur dalam jangka waktu tahun 2016-2020 (dalam ribu jiwa).

- Desentralisasi fiskal

Desentralisasi fiskal merupakan suatu bentuk wewenang dari pemerintah pusat yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk mengelola keuangan dalam rangka pembangunan daerah. Data variabel yang digunakan adalah data kontribusi selisih dari jumlah pendapatan asli daerah di setiap wilayah masing-masing dengan total pendapatan daerah yang hasilnya adalah derajat desentralisasi fiskal dalam jangka waktu tahun 2016-2020 yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (dalam persen).

3.3 Metode Analisis

Peneliti melakukan penelitian bersifat kuantitatif dengan menggunakan variabel independen yakni produk domestik regional bruto, IPM, jumlah penduduk, dan desentralisasi

fiskal terhadap variabel dependen yaitu kemiskinan. Model yang akan digunakan adalah metode analisis regresi data panel serta dalam analisis menggunakan program Eviews 12. Definisi regresi data panel merupakan gabungan antara data *cross section* dengan data *time series* serta untuk unit *cross section* yang sama akan diukur dengan jangka waktu yang berbeda. Sehingga, data panel adalah pengamatan data dari beberapa variabel yang sama kemudian dianalisis dalam jangka waktu tertentu. Pada penelitian ini menggunakan data yang dianalisis dalam kurun waktu dari tahun 2016-2020. Model yang akan digunakan adalah:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 LJPDRBit + \beta_2 IPMit + \beta_3 JPit + \beta_4 DFit + e_{it}$$

Di mana:

β_0 = Koefisien regresi variabel dependen

Y_{it} = Kemiskinan (Ribuan jiwa)

$LJPDRBit$ = Laju Pertumbuhan Domestik Regional Bruto (Persen)

$IPMit$ = Indeks Pembangunan Manusia (Persen)

$JPit$ = Jumlah Penduduk (Juta jiwa)

$DFit$ = Desentralisasi Fiskal (Persen)

e_{it} = Error Term

3.4 Estimasi Model Regresi Data Panel

Penggabungan antara data *cross section* dan *time series* dilakukan jika data yang telah terkumpul maka menjadi model yang saling berkaitan antara pengaruh penjelas terhadap respon suatu data panel. Dengan pendugaan atau melakukan estimasi suatu data panel, ada 2 pendekatan yang dapat dilakukan yakni tidak melibatkan pengaruh pada individu (*Common Effect Model*) dan melibatkan pengaruh individu (*Fixed Effect Model* dan *Random effect Model*).

a. *Common Effect Model* (CEM)

Metode ini adalah metode yang sangat sederhana untuk mengestimasi data di mana pada model ini hanya melibatkan antara data *time series* dengan *cross section* tanpa mengacu pada waktu dan individu berdasarkan data yang sama dari segi kurun waktu. Untuk estimasi

pada model ini dapat dilakukan dengan *Ordinary Least Square* (OLS), namun model ini terdapat kekurangan yakni tidak dapat membedakan varian antara *time series* dengan *cross section* karena memiliki nilai intercept yang sama.

b. *Fixed Effect Model* (FEM)

Metode ini adalah suatu model yang disebut model tetap. Sehingga, ketika mengestimasi akan melibatkan variabel dummy di mana *slope* akan menjadi asumsi tetap. Sedangkan untuk hasil *intercept* tidak akan sama karena perbedaan individu dan kurun waktu. Variabel dummy atau *Least Square Dummy Variable* (LSDM) berfungsi sebagai sesuatu yang dapat melacak setiap perbedaan pada individu dan kurun waktu suatu data. Tujuan dilakukan pembobotan adalah untuk menghindari penyakit heterogenitas pada data antar unit *cross section*, namun kekurangan pada model ini adalah berkurangnya derajat kebebasan (*degree of freedom*) sehingga akan mengurangi efisiensi parameter.

c. *Random Effect Model* (REM)

Metode ini berkaitan dengan berkurangnya derajat kebebasan (*degree of freedom*) yang ada di model *Fixed Effect Model* (FEM) maka *Random Effect Model* muncul sebagai pelengkap yang melibatkan variabel gangguan (*error term*), di mana ada hubungan antar kabupaten/kota dan kurun waktu. Sehingga, model ini memungkinkan dapat menghapus heteroskedastisitas. Pada model ini dapat disebut juga sebagai *Generalized Least Square* (GLS) atau *Error Component Model* (ECM).

3.5 Pemilihan Model Estimasi

Pemilihan estimasi sebuah penelitian dapat dilakukan dengan mempertimbangkan model statistik untuk memperoleh hipotesis yang tepat dan efisien, ada beberapa pengujian di antaranya:

a. Uji Chow (*Chow Test*)

Uji Chow (*Chow Test*) merupakan uji yang digunakan untuk memilih metode yang terbaik serta menyesuaikan data dari hasil uji *common effect model* dan *fixed effect model*.

Berikut hipotesis yang digunakan dalam uji chow yakni:

H_0 = Model *Common Effect* atau *Pooled Least Square* (PLS), pada model ini dapat dipilih apabila hasil nilai prob.F statistik tidak memiliki signifikansi pada $\alpha = 5\%$

H_1 = Model *Fixed Effect*, pada model ini dapat dipilih apabila nilai Prob.F statistik memiliki signifikansi pada $\alpha = 5\%$

Berdasarkan hipotesis apabila hasil yang diperoleh dari uji chow menunjukkan bahwa model terbaik adalah *fixed effect model*, maka pengujian yang berikutnya yaitu dengan mengestimasi Uji Hausman.

b. Uji Hausman (*Hausman Test*)

Uji Hausman (*Hausman Test*) merupakan uji yang digunakan untuk memilih metode yang terbaik serta menyesuaikan data dari hasil uji *random effect model* dan *fixed effect model*.

Berikut hipotesis yang digunakan dalam uji hausman yakni:

H_0 = Model *random effect model*, pada model ini dapat dipilih apabila hasil nilai Chi-Squarenya tidak memiliki signifikansi pada $\alpha = 5\%$

H_1 = Model *fixed Effect model*, pada model ini dapat dipilih apabila nilai Chi-Squarenya memiliki signifikansi pada $\alpha = 5\%$

c. Uji Lagrange Multiplier (*Lagrange Multiplier Test*)

Uji lagrange multiplier adalah uji yang digunakan untuk memilih metode yang terbaik serta menyesuaikan data dari hasil uji *Random effect model* dan *Common effect model* (OLS), Sehingga untuk mengetahui model manakah yang terbaik dilakukan dengan uji Lagrange Multiplier (LM).

3.6 Uji Asumsi Klasik

Menurut Gujarati, N. D. & Dawn (2013) hasil dari model regresi yang tidak bias atau tidak bersifat BLUE (*Blue Linear Unbiased Estimator*) maka terlebih dahulu diperlukan uji asumsi klasik. Dalam analisis uji asumsi klasik terdapat satu pengujian yaitu uji normalitas. Uji normalitas adalah metode yang digunakan untuk menguji apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak antar variabel dependen dan variabel independen dalam model regresi. Keputusan model terbaik dalam pengujian dapat diketahui dengan mengetahui variabel-variabel tersebut berdistribusi normal, dari hasil *Jarque-Bera Test (J-B test)*. Apabila nilai probabilitas lebih dari 0.05 maka data adalah berdistribusi normal, begitu pula sebaliknya apabila nilai probabilitas kurang dari 0.05 maka data tidak berdistribusi normal.

3.7 Uji Statistik

Uji signifikansi digunakan untuk mendeteksi adanya kesalahan dan kebenaran dari hasil hipotesis nol suatu sampel. Ada beberapa langkah pada uji statistik yakni:

a. Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) merupakan pengujian untuk mengukur dan mengetahui kemampuan suatu model dalam menjelaskan besarnya pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai dari koefisien determinasi ini adalah 0 dan 1. Jika nilai koefisien (R^2) = 1, maka besarnya pengaruh variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat adalah sempurna. Sebaliknya, jika nilai koefisien (R^2) = 0, maka besarnya pengaruh variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat kurang baik. Dapat disimpulkan bahwa semakin kecil nilai (R^2) dalam kemampuan menjelaskan di setiap variabel bebas terhadap variabel terikat maka hasil penelitiannya kurang efisien. Namun, apabila semakin besar nilai (R^2) dalam kemampuan menjelaskan di setiap variabel bebas terhadap variabel terikat maka dikatakan hasil penelitian yang dilakukan dapat memperkirakan 100% variasi variabel terikat.

b. Koefisien Regresi Secara Bersama-sama (Uji Statistik F)

Uji koefisien regresi secara bersamaan (uji F) merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel bebas dengan tingkat signifikansi terhadap variabel terikat. Berikut adalah hipotesis yang dapat digunakan dalam uji F:

H_0 = Tidak ada pengaruh yang secara signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

H_1 = Ada pengaruh yang secara signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

Penentuan nilai uji F dapat dianalisis yaitu apabila semakin besar nilai F-hitung terhadap nilai F-tabel maka hasilnya adalah menolak H_0 , artinya bahwa semua variabel bebas dari uji ini secara simultan ada pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Sedangkan, apabila semakin kecil nilai F-hitung terhadap nilai F-tabel maka hasilnya adalah gagal menolak H_0 atau menerima H_1 artinya bahwa semua variabel bebas dari uji ini secara simultan tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

c. Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji Statistik t)

Uji statistik secara parsial (uji t) merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat dengan asumsi bahwa variabel-variabel bebas bernilai konstan berdasarkan nilai probabilitasnya. Berikut hipotesis yang dapat dilakukan pada uji t yakni:

1. Pengaruh Laju pertumbuhan produk domestik regional bruto terhadap tingkat kemiskinan
 $H_0 : \beta = 0$, tidak ada pengaruh antara laju pertumbuhan produk domestik regional bruto terhadap tingkat kemiskinan.
 $H_1 : \beta < 0$, terdapat pengaruh negatif antara laju pertumbuhan produk domestik regional bruto terhadap tingkat kemiskinan
 2. Pengaruh Indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan
 $H_0 : \beta = 0$, tidak ada pengaruh antara indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan.
 $H_1 : \beta < 0$, terdapat pengaruh negatif antara indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan
 3. Pengaruh Jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan
 $H_0 : \beta = 0$, tidak ada pengaruh antara jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan.
 $H_1 : \beta < 0$, terdapat pengaruh positif antara jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan
 4. Pengaruh Desentralisasi fiskal terhadap tingkat kemiskinan
 $H_0 : \beta = 0$, tidak ada pengaruh antara desentralisasi fiskal terhadap tingkat kemiskinan.
 $H_1 : \beta < 0$, terdapat pengaruh negatif antara desentralisasi fiskal terhadap tingkat kemiskinan
- Hasil yang diperoleh dari uji t ini, maka apabila nilai probabilitas t hitung lebih besar dari 0.05 maka menolak atau menerima. Sedangkan, apabila nilai probabilitas t hitung kecil besar dari 0.05 maka menerima atau menolak, dengan tingkat signifikansi yang digunakan adalah sebesar 5%.

BAB IV

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan jenis data panel di mana penggabungan antara data *cross section* dan data *time series*. Data *cross section* yang digunakan pada penelitian ini adalah 29 kabupaten dan 9 kota di Provinsi Jawa Timur, sedangkan untuk data *time series* melibatkan data antara lain laju produk domestik regional bruto, indeks pembangunan manusia, jumlah penduduk dan desentralisasi fiskal dari kurun waktu 2016 sampai 2020. Alat analisis pada penelitian ini adalah memilih metode yang terbaik dan tepat berdasarkan data yang telah diolah, antara lain dengan *common effect model*, *fixed effect model* maupun *random effect model*. Setelah dilakukan pemilihan model terbaik dan tepat kemudian dilanjutkan uji normalitas dan uji statistik pada data. Seluruh pengujian yang dilakukan dibantu oleh software program Eviews 12. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh yang diperoleh dari 4 variabel bebas (*independent variable*) terhadap satu variabel terikat (*dependent variable*). Adapun variabel-variabel tersebut adalah:

4.1.1 Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel dependen pada penelitian ini adalah menggunakan jumlah penduduk miskin yang ada di 38 Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2016 sampai 2020 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur.

4.1.2 Variabel Bebas (*Independent Variable*)

- Variabel Independen yang pertama adalah peneliti menggunakan data laju pertumbuhan produk domestik regional bruto yang ada di 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2016 sampai 2020 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur.
- Variabel Independen yang kedua adalah peneliti menggunakan data indeks pembangunan manusia yang ada di 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2016 sampai 2020 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur.
- Variabel Independen yang ketiga adalah peneliti menggunakan jumlah penduduk yang ada di 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2016 sampai 2020 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur.

- Variabel Independen yang keempat adalah peneliti menggunakan desentralisasi fiskal yang ada di 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2016 sampai 2020 yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

4.2 Hasil Analisis dan Pembahasan

4.2.1 Analisis Deskriptif

Tabel 4.1 Hasil Analisis Deskriptif

Indikator	Observ	Mean	Standar Deviasi	Maximum	Minimum
	.				
Kemiskinan	195	227.042	689.086	4703.300	6.630
LJPDRB	195	3.735	3.643	21.950	-6.460
IPM	195	70.931	5.157	82.230	59.090
JP	195	2033162	6152286	40665696	126404.0
DF	195	16.507	10.582	64.250	1.360

Sumber: Data diolah dengan software Eviews 12

Berdasarkan hasil analisis deskriptif yang diperoleh menunjukkan bahwa untuk variabel laju pertumbuhan produk domestik regional bruto memiliki nilai *mean* sebesar 3.735 dengan nilai standar deviasi sebesar 3.643. Variabel indeks pembangunan manusia memiliki nilai *mean* sebesar 70.931 dengan standar deviasi sebesar 5.157, kemudian untuk variabel jumlah penduduk dengan nilai *mean* 2033162 dan standar deviasi sebesar 6152286. Sementara untuk variabel bebas lainnya yaitu desentralisasi fiskal memiliki nilai *mean* 16.507 dengan nilai standar deviasi sebesar 10.582. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi data pada periode penelitian ini hasil analisis deskriptif tidak ada data yang memiliki karakteristik lain yang sangat jauh berbeda dari nilai *mean*, *minimum* dan *maximum*.

Menurut penelitian sebelumnya oleh (Anwar, 2017) bahwa data yang dihasilkan dari uji analisis deskriptif adalah menunjukkan apakah terdapat data yang menyimpang dari suatu rangkaian data (*outliers*) serta menganalisis terdapat data yang bias terhadap masing-masing

variabel, sehingga akan menyebabkan ketidaksesuaian dengan fenomena yang sebenarnya terjadi. Oleh karena itu, berdasarkan hasil analisis deskriptif yang dilakukan pada data dapat mempresentasikan hasil analisis dari penelitian ini.

Setelah melakukan analisis deskriptif dilakukan, selanjutnya pada penelitian ini penulis melakukan regresi data panel dengan menggunakan metode terbaik yaitu dengan memilih metode *common effect model*, *fixed effect model*, maupun *random effect model*. Adapun hasil yang diperoleh dari ketiga model pengujian tersebut adalah:

4.2.2 Hasil Pengujian Model Data Panel

Tabel 4.2 Hasil Estimasi (Common Effect Model, Fixed Effect Model, dan Random Effect Model)

Variabel	Model 1		Model 2		Model 3	
	Common Effect Model (CEM)		Fixed Effect Model (FEM)		Random Effect Model (REM)	
	Coeff.	Prob.	Coeff.	Prob.	Coeff.	Prob.
C	246.955	0.000	135.960	0.004	170.797	0.000
LJPDRB	-0.573	0.447	0.024	0.958	-0.073	0.872
IPM	-2.910	0.000	-1.449	0.029	-1.919	0.001
JP	0.0001	0.000	0.0001	0.000	0.0001	0.000
DF	-2.972	0.000	-2.723	0.000	-2.782	0.000
R-squared	0.988		0.997		0.995	
Adjust R-square	0.988		0.996		0.995	
F-Statistic	3782.671		1070.39		8996.127	
Prob. F-Statistic	0.000		0.000		0.000	
S.D. dependen var	340.265		340.265		310.398	
Durbin-Watson stat	0.478		1.616		1.280	

Sumber: Data diolah dengan software Eviews 12.

Berdasarkan hasil analisis output regresi dari ketiga model yaitu metode *common effect model*, *fixed effect model* dan *random effect model*. Secara keseluruhan, model ini dapat menjelaskan pengaruh variabel bebas secara bersamaan terhadap variabel terikat kemiskinan. Hasil menunjukkan bahwa variabel utama untuk penelitian ini adalah kemiskinan untuk variabel laju pertumbuhan produk domestik regional bruto memiliki nilai koefisien positif 0.024 untuk model *fixed effect*, sedangkan pada model *common effect* dan *random effect* bernilai negatif yaitu -0.573 dan -0.073, secara bersamaan dari ketiga model memiliki nilai probabilitas yang signifikan pada tingkat 10 persen. Artinya bahwa laju pertumbuhan produk domestik regional bruto semakin meningkat maka jumlah penduduk miskin akan semakin berkurang di setiap daerah. Dari ketiga model, variabel indeks pembangunan manusia juga bersamaan memiliki nilai koefisien negatif yaitu -2.910, -1.449 dan -1.919 dengan signifikan pada tingkat 5 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan dalam pembangunan kualitas hidup di masyarakat cenderung membaik dan berlawanan dengan jumlah penduduk miskin yang semakin rendah.

Hasil estimasi lain pada kemiskinan dari variabel jumlah penduduk juga memiliki nilai koefisien yang sama dan signifikan yang positif pada level 5 persen yang memiliki arti bahwa pertumbuhan penduduk yang meningkat akan cenderung menyebabkan kemiskinan semakin meningkat pula. Nilai koefisien jumlah penduduk yang positif searah dengan penelitian oleh (Fasholla, 2018) pada level regional Jawa Tengah. Berdasarkan kondisi otonomi daerah di masing masing wilayah, melalui ketiga model tersebut variabel desentralisasi fiskal memiliki nilai koefisien negatif sebesar -2.972, -2.723 dan -2.782 dengan signifikan pada level 5 persen. Nilai koefisien yang negatif telah membuktikan bahwa semakin baik desentralisasi fiskal suatu daerah maka semakin sanggup pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran di setiap kabupaten/kota dan berdampak berkurangnya pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, peran pemerintah baik dari segi alokasi, distribusi, maupun stabilisasi dalam hal sumber daya ekonomi diharapkan mampu mendorong perekonomian yang lebih terkendali.

4.3 Pemilihan Model Terbaik

4.3.1 Uji Chow (Chow Test)

Uji Chow (Chow Test) merupakan pengujian yang dilakukan untuk memilih metode yang lebih baik dan tepat antara *Common effect model* dan model *fixed effect model* dengan melihat nilai prob F dan alpha (α). Adapun rumusan hipotesis dalam Uji Chow adalah sebagai berikut:

H_0 = Memilih *Common effect model*, jika nilai prob.F statistiknya tidak memiliki signifikansi pada alpha (α) =5%.

H_1 = Memilih *Fixed effect model*, jika nilai prob.F statistiknya memiliki signifikansi pada alpha (α) =5%.

Berdasarkan hasil regresi yang diperoleh dari peneliti dalam memilih model terbaik antara *Common effect model* dan *fixed effect model* maka diperoleh hasil dari probabilitas sebagai berikut:

Tabel 4.3 Hasil Uji Chow menggunakan Redundant test

Effect Test	Statistic	d.f	Prob.
Cross-section F	10.375	(37,148)	0.000
Cross-section Chi-square	243.053	37	0.000

Sumber: Data diolah dari software Eviews 12

Hasil pengujian oleh uji Chow (Chow Test) menunjukkan bahwa nilai prob *cross-section F* sebesar 0.000 lebih kecil dari alpha (α) =5% ($0.000 < 0.05$) maka secara hipotesis H_0 ditolak. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa model yang lebih baik dan tepat untuk pengujian hipotesis adalah model *fixed effect model*. Berdasarkan hasil yang diperoleh, selanjutnya akan dilakukan pengujian kembali apakah penelitian ini menggunakan model *fixed effect* atau *random effect*. Pengujian yang tepat untuk memilih antara *fixed effect* atau *random effect* maka perlu dilakukan Uji Hausman (Hausman Test).

4.3.2 Uji Hausman (Hausman Test)

Uji Hausman (Hausman Test) merupakan pengujian yang dilakukan untuk memilih metode antara *fixed effect* atau *random effect* dengan melihat nilai probabilitas dan nilai alpha (α). Berikut rumusan hipotesis dalam Uji Hausman adalah sebagai berikut:

H_0 = Memilih *Random effect model*, jika nilai Chi-square tidak memiliki signifikansi pada alpha (α) =5%.

H_1 = Memilih *Fixed effect model*, jika nilai Chi-square memiliki signifikansi pada alpha (α) =5%.

Berdasarkan hasil regresi yang diperoleh dari peneliti dalam memilih model terbaik antara *random effect* dan *fixed effect* maka diperoleh hasil dari probabilitas sebagai berikut:

Tabel 4.4 Hasil Uji Regresi Hausman

Test Summary	Chi-Sq.Statistic	Chis-Sq. d.f	Prob.
Cross-section random	6.422	4	0.170

Sumber: Data diolah dari software Eviews 12

Berdasarkan hasil regresi yang diperoleh dari Uji Hausman menunjukkan bahwa nilai distribusi pada *Chi-square Statistic* sebesar 6.422 dengan nilai *probabilitas Chi-square* sebesar 0.170 di mana hasil tersebut lebih besar dari alpha (α) 5% atau ($0.1670 > 0.05$), sehingga dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa model yang terbaik dan tepat dalam penelitian ini adalah *random effect model*.

4.3.3 Uji Lagrange Multiple (*Lagrange Multiple Test*)

Uji Lagrange Multiple (*Lagrange Multiple Test*) merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah model yang tepat *random effect* atau *common effect* yang digunakan dalam penelitian ini dengan melihat nilai *cross section* pada *Breusch-Pagan* dan nilai alpha (α). Adapun rumusan hipotesis dari uji *Lagrange Multiple* adalah sebagai berikut:

H_0 = Memilih *Fixed effect model*, jika nilai probabilitas tidak memiliki signifikansi pada alpha (α) =5%.

H_1 = Memilih *Random effect model*, jika nilai probabilitas memiliki signifikansi pada alpha (α) =5%.

Berdasarkan hasil regresi yang diperoleh dari peneliti dalam memilih model terbaik antara *common effect model* dan *random effect model* maka diperoleh hasil dari probabilitas sebagai berikut:

Tabel 4.5 Hasil Regresi Uji Multiple Lagrange

	Cross-section	Time	Both
Breusch- Pagan	149.834 (0.000)	0.013 (0.921)	149.847 (0.000)

Sumber: Data diolah dari software Eviews 12.

Berdasarkan hasil regresi yang diperoleh dari Uji *Multiple Lagrange* menunjukkan bahwa nilai distribusi pada *Cross section* sebesar 149.834 dengan nilai probabilitas sebesar 0.000 di mana hasil tersebut lebih kecil dari alpha (α) 5% atau ($0.000 < 0.05$), sehingga dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa model yang terbaik dan tepat dalam penelitian ini adalah *random effect model*.

4.3.4 Hasil Model Regresi Panel Terbaik

Tabel 4.6 Hasil Regresi Model Random Effect

Variabel	Random Effect Model (REM)			
	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	170.797	40.924	4.173	0.000
LJPDRB	-0.073	0.456	-0.161	1.872
IPM	-1.919	0.581	-3.304	0.0011
JP	0.0001	0.00000006. 65	182.741	0.000
DF	-2.782	0.252	-11.042	0.000
R-squared	0.995	Prob. F-statistic		0.000
Adjusted R-squared	0.995	S.D. dependent var		130.398
F-statistic	8996.127	Durbin-Watson stat		1.280

Sumber: Data diolah dengan Software Eviews 12.

Berdasarkan hasil regresi dari *random effect model* pada tabel 4.6 diperoleh hasil persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 170.797 - 0.073LJPDRB_{it} - 1.919IPM_{it} + 0.0001JP_{it} - 2.782DF_{it} + \epsilon_{it}$$

Di mana:

β_0 = Koefisien regresi variabel dependen

Y = Kemiskinan (Ribuan jiwa)

LJPDRBit = Laju Pertumbuhan Domestik Regional Bruto (Persen)

IPMit = Indeks Pembangunan Manusia (Persen)

JPit = Jumlah Penduduk (Juta jiwa)

DFit = Desentralisasi Fiskal (Persen)

e_{it} = Error Term

Hasil regresi terpilih yang tepat dan terbaik untuk penelitian ini adalah model *random effect model*. Diperoleh hasil nilai koefisien untuk variabel yang memengaruhi kemiskinan yaitu laju pertumbuhan produk domestik regional bruto dan indeks pembangunan manusia yang secara bersama-sama memiliki koefisien negatif sebesar -0.073 dan -1.919 dengan probabilitas tidak signifikan pada tingkat 5%. Hal ini menunjukkan bahwa apabila laju pertumbuhan produk domestik dan indeks pembangunan manusia mengalami peningkatan 1 persen maka jumlah penduduk miskin akan berkurang sebesar 0.073 dan 1.919. Selanjutnya, pengaruh lain yaitu jumlah penduduk memiliki nilai koefisien sebesar 0.0001 dengan probabilitas signifikan pada tingkat 5%, yang justru ketika jumlah penduduk meningkat sebesar 1 persen maka jumlah penduduk miskin juga akan meningkat sebesar 0.0001. Artinya semakin bertambah jumlah pertumbuhan penduduk di suatu wilayah akan menyebabkan kemiskinan semakin meningkat tanpa ikut berpartisipasi dalam kebijakan dari pemerintah seperti program Keluarga Berencana (KB). Pengaruh lain untuk kemiskinan adalah desentralisasi fiskal dengan nilai koefisien -2.782 dengan probabilitas signifikan pada tingkat 5%. Nilai koefisien yang negatif menandakan bahwa ketika semakin baik daerah tersebut dalam mengalokasikan anggaran sebesar 1 % akan mengurangi jumlah penduduk miskin sebesar 2.782, sehingga semakin baik pemerintah daerah dalam menyusun keuangan masing-masing kabupaten/kota akan dapat memperbaiki efisiensi perekonomian, akuntabilitas, serta mengurangi jumlah kemiskinan yang selalu melonjak di setiap tahunnya.

4.3.5 Hasil Nilai Intercept

Tabel 4.7 Cross Effect

	Kabupaten/Kota	Koefisien	Effect	Intercept
1	Pacitan	170.7968	-8.532026	162.2648
2	Ponorogo	170.7968	-15.07751	155.7193
3	Trenggalek	170.7968	-12.07511	158.7217
4	Tulungagung	170.7968	-36.17979	134.6170
5	Blitar	170.7968	-16.71080	154.0860
6	Kediri	170.7968	28.86648	199.6633
7	Malang	170.7968	45.30472	216.1015
8	Lumajang	170.7968	-20.27618	150.5206
9	Jember	170.7968	28.29253	199.0893
10	Banyuwangi	170.7968	-33.34053	137.4563
11	Bondowoso	170.7968	7.651791	178.4486
12	Situbondo	170.7968	-10.55301	160.2438
13	Probolinggo	170.7968	96.20847	267.0053
14	Pasuruan	170.7968	0.121685	170.9185
15	Sidoarjo	170.7968	-62.95824	107.8386
16	Mojokerto	170.7968	-3.770426	167.0264
17	Jombang	170.7968	-4.672190	166.1246
18	Nganjuk	170.7968	7.022694	177.8195
19	Madiun	170.7968	-13.29409	157.5027
20	Magetan	170.7968	-20.39442	150.4024
21	Ngawi	170.7968	19.32430	190.1211

22	Bojonegoro	170.7968	29.59463	200.3914
23	Tuban	170.7968	55.34294	226.1397
24	Lamongan	170.7968	39.07304	209.8698
25	Gresik	170.7968	34.81380	205.6106
26	Bangkalan	170.7968	72.37814	243.1749
27	Sampang	170.7968	71.48517	242.2820
28	Pamekasan	170.7968	15.03940	185.8362
29	Sumenep	170.7968	85.25054	256.0473
30	Kota Kediri	170.7968	-29.83762	140.9592
31	Kota Blitar	170.7968	-33.55825	137.2386
32	Kota Malang	170.7968	-48.67574	122.1211
33	Kota Probolinggo	170.7968	-41.71133	129.0855
34	Kota Pasuruan	170.7968	-39.22530	131.5715
35	Kota Mojokerto	170.7968	-36.96848	133.8283
36	Kota Madiun	170.7968	-32.50627	138.2905
37	Kota Surabaya	170.7968	-71.07971	99.71709
38	Kota Batu	170.7968	-44.37330	126.4235

Sumber: Data diolah dengan Software Eviews 12.

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.7 diperoleh hasil intercept dengan masing-masing Kabupaten/Kota memiliki nilai intercept yang positif, dapat disimpulkan bahwa apabila kemiskinan tidak dipengaruhi oleh variabel laju pertumbuhan domestik regional bruto (LJPDRB), Indeks pembangunan manusia (IPM), Jumlah penduduk (JP), dan Desentralisasi fiskal (DF) maka tingkat kemiskinan terbesar berada di Kabupaten Probolinggo dengan nilai intercept sebesar 267.0053 persen dan tingkat kemiskinan terkecil berada di Kota Surabaya dengan nilai intercept 99.71709 persen.

4.4 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.4.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas merupakan pengujian untuk mengukur apakah data yang diolah berdistribusi normal atau tidak, dengan asumsi bahwa model terbaik berasal dari variabel yang berdistribusi normal maupun mendekati normal. Dengan melihat hasil *Jarque-Bera Test (J-B test)*, apabila nilai probabilitas lebih dari alpha 5 % (0.05) maka data termasuk berdistribusi normal begitu pula sebaliknya apabila nilai probabilitas kurang dari alpha 5% (0.05) maka data tidak berdistribusi normal. Adapun hasil uji normalitas yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8 Hasil Regresi Uji Normalitas

Jarque-Bera	Probability
1.802	0.406

Sumber: Data diolah pada software Eviews 12.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dapat dilihat nilai probabilitas sebesar 0.406. Nilai probabilitas sebesar 0.406 lebih besar dari alpha 5% ($0.406 > 0.05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diolah termasuk berdistribusi normal.

4.5 Hasil Uji Statistik

4.5.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) merupakan koefisien yang berfungsi untuk menunjukkan besarnya pengaruh variabel independen (LJPDRB, IPM, jumlah penduduk, dan desentralisasi fiskal) terhadap variabel dependen (kemiskinan). Berdasarkan hasil regresi pada tabel 4.6 pada model *random effect model* bahwa diperoleh nilai (R^2) sebesar 0.995, artinya variabel dependen (kemiskinan) dapat dijelaskan oleh variabel bebas (LJPDRB, IPM, jumlah penduduk, dan desentralisasi fiskal) sebesar 99,50% dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model sebesar 0.50%.

4.5.2 Koefisien Regresi Secara Bersama-sama (Uji F)

Koefisien regresi secara bersama-sama (Uji F) merupakan koefisien yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen (kemiskinan). Berdasarkan hasil regresi nilai F-hitung sebesar 8996.127 dengan nilai

probabilitas sebesar $0.000 < \alpha = 5\%$, sehingga dapat disimpulkan secara statistik bahwa model *random effect* variabel independen (laju pertumbuhan produk domestik regional bruto, indeks pembangunan manusia, jumlah penduduk dan desentralisasi fiskal) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (kemiskinan).

4.5.3 Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Koefisien regresi secara parsial (Uji t) merupakan koefisien yang berfungsi untuk mengetahui bagaimana tingkat signifikansi masing-masing suatu variabel dalam suatu penelitian. Pada analisis ini dapat dilakukan dengan membandingkan antara nilai t hitung dengan t tabel, selain itu juga dapat melihat dari hasil p-value pada masing-masing t hitung suatu variabel. Adapun rumusan hipotesis pada uji t adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Laju pertumbuhan produk domestik regional bruto terhadap tingkat kemiskinan
 $H_0 : \beta = 0$, tidak ada pengaruh antara laju pertumbuhan produk domestik regional bruto terhadap tingkat kemiskinan.
 $H_1 : \beta < 0$, terdapat pengaruh negatif antara laju pertumbuhan produk domestik regional bruto terhadap tingkat kemiskinan
2. Pengaruh Indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan
 $H_0 : \beta = 0$, tidak ada pengaruh antara indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan.
 $H_1 : \beta < 0$, terdapat pengaruh negatif antara indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan
3. Pengaruh Jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan
 $H_0 : \beta = 0$, tidak ada pengaruh antara jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan.
 $H_1 : \beta < 0$, terdapat pengaruh positif antara jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan
4. Pengaruh Desentralisasi fiskal terhadap tingkat kemiskinan
 $H_0 : \beta = 0$, tidak ada pengaruh antara desentralisasi fiskal terhadap tingkat kemiskinan.
 $H_1 : \beta < 0$, terdapat pengaruh negatif antara desentralisasi fiskal terhadap tingkat kemiskinan

1. Pengaruh terhadap variabel laju pertumbuhan produk domestik regional bruto
Hasil regresi dengan metode *random effect model* di atas menunjukkan bahwa variabel laju pertumbuhan produk domestik regional bruto memiliki nilai koefisien sebesar -0.073 dan nilai t-hitung -0.161 dengan nilai probabilitas sebesar 1.872. Berdasarkan nilai probabilitas yang diperoleh dari $\alpha = 5\%$ ($1.872 > 0.05$), oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa secara statistik variabel laju pertumbuhan produk domestik regional bruto (LJPDRB) tidak berpengaruh terhadap kemiskinan regional di kabupaten/kota Jawa Timur.
2. Pengaruh terhadap variabel Indeks pembangunan manusia
Hasil regresi dengan metode *random effect model* di atas, menunjukkan bahwa variabel indeks pembangunan manusia memiliki nilai koefisien sebesar -1.919 dan nilai t-hitung -3.304 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0011. Berdasarkan nilai probabilitas yang diperoleh dari $\alpha = 5\%$ ($0.0011 < 0.05$), oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa secara statistik variabel Indeks pembangunan manusia (IPM) signifikan dan memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan regional di kabupaten/kota Jawa Timur.
3. Pengaruh terhadap variabel Jumlah penduduk
Hasil regresi dengan metode *random effect model* di atas, menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk memiliki nilai koefisien sebesar 0.0001 dan nilai t-hitung 182.741 dengan nilai probabilitas sebesar 0.000. Berdasarkan nilai probabilitas yang diperoleh dari $\alpha = 5\%$ ($0.000 < 0.05$), oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa secara statistik variabel jumlah penduduk (JP) signifikan dan memiliki pengaruh positif terhadap kemiskinan regional di kabupaten/ kota Jawa Timur.
4. Pengaruh terhadap variabel Desentralisasi fiskal
Hasil regresi dengan metode *random effect model* di atas, menunjukkan bahwa variabel desentralisasi fiskal memiliki nilai koefisien sebesar -2.782 dan nilai t-hitung -11.042 dengan nilai probabilitas sebesar 0.000. Berdasarkan nilai probabilitas yang diperoleh dari $\alpha = 5\%$ ($0.000 < 0.05$), oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa secara statistik variabel desentralisasi fiskal (DF) signifikan dan memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan regional di kabupaten/kota Jawa Timur.

4.6 Analisis Ekonomi

4.6.1 Analisis Pengaruh Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Kemiskinan

Laju pertumbuhan produk domestik regional bruto (LJPDRB) adalah variabel independen yang pada penelitian ini memiliki nilai probabilitas sebesar $1.872 > 0.05$ dalam tingkat 5%, dengan nilai koefisien regresi sebesar -0.073 . Hal ini menunjukkan bahwa variabel laju pertumbuhan produk domestik regional mempunyai pengaruh negatif dan secara tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan regional di kabupaten/kota Jawa Timur. Berdasarkan kajian teori, bahwa hasil penelitian ini sama dengan hipotesis yang menyatakan bahwa laju pertumbuhan produk domestik regional bruto merupakan variabel yang berpengaruh secara negatif terhadap tingkat kemiskinan di suatu wilayah.

Penelitian oleh Putra(2015) menyatakan bahwa laju pertumbuhan produk domestik regional bruto berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan laju pertumbuhan produk domestik regional bruto diyakini dapat mengurangi kepadatan jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota Jawa Timur. Penurunan tingkat kemiskinan dapat dikatakan berhasil apabila memiliki syarat kecukupan salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi yang efektif. Penelitian ini sejalan dengan Khasanah (2021) bahwa produk domestik regional bruto berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian, perekonomian yang baik dan merata di setiap sudut golongan pendapatan termasuk masyarakat miskin dapat terjadi di semua sektor khususnya pertanian dan padat karya baik secara langsung maupun tidak langsung. Upaya pemerintah yang cukup efektif dalam menekan angka kemiskinan di suatu daerah dengan laju pertumbuhan produk domestik regional bruto yang tinggi.

4.6.2 Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan

Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan variabel independen kedua dalam penelitian ini dengan nilai probabilitas sebesar $0.0011 < 0.05$ dalam signifikan 5%, dengan nilai koefisien regresi sebesar -1.919 . Hal ini menunjukkan bahwa variabel indeks pembangunan manusia mempunyai pengaruh negatif dan secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan regional di kabupaten/kota Jawa Timur. Berdasarkan kajian teori, bahwa hasil penelitian ini sama dengan

hipotesis yang menyatakan bahwa indeks pembangunan manusia merupakan variabel yang berpengaruh secara negatif terhadap tingkat kemiskinan di suatu daerah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Sholikhin (2021) menjelaskan bahwa indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh secara negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian sebelumnya oleh Sholikhati (2020) bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2011 sampai 2016. Peningkatan indeks pembangunan manusia yang semakin baik akan memberikan dampak pada penyerapan sumber daya yang berkualitas, sehingga akan menciptakan produktivitas kerja yang baik bagi perusahaan atau instansi lainnya. Di samping itu, perkembangan indeks pembangunan manusia tidak terlepas dari masalah yang akan dihadapi seperti rendahnya sarana pendidikan dan kesehatan yang akan menimbulkan kemiskinan di suatu daerah semakin meningkat sebab kurangnya intervensi dan perhatian dari pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan yang tepat sasaran untuk menurunkan jumlah penduduk miskin melalui kebijakan gratis biaya sekolah dan biaya perawatan kesehatan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu.

4.6.3 Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Kemiskinan

Jumlah penduduk (JP) merupakan variabel independen ketiga dalam penelitian ini dengan nilai probabilitas sebesar $0.0000 < 0.05$ dalam signifikan 5%, dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.0001. Hal ini menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk mempunyai pengaruh positif dan secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan regional di kabupaten/kota Jawa Timur. Berdasarkan kajian teori, bahwa hasil penelitian ini sama dengan hipotesis yang menyatakan bahwa jumlah penduduk merupakan variabel yang berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan regional. Dengan hasil regresi yang sama akan membuat penelitian ini semakin efektif dan terpercaya dengan pendugaan sebelumnya.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian sebelumnya oleh Enrian (2021) menjelaskan bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Riau. Artinya naik turunnya jumlah penduduk akan memengaruhi jumlah penduduk miskin di suatu daerah. Berdasarkan kepadatan penduduk yang semakin pesat hal ini tidak ada unsur kesengajaan atau alasan lain, karena fenomena ini tumbuh secara tidak terkendali,

sehingga akan berdampak pada pembangunan di masing-masing daerah akan terhambat dan muncul ketidakejahteraan masyarakat. Selain itu, dampak buruk dari kepadatan penduduk yang terlampau tinggi akan berpengaruh pada tingkat sumber daya yang terbatas dan produktivitas yang rendah dan diiringi dengan upah kerja yang sedikit. Oleh karena itu, dengan menekan jumlah penduduk yang stabil dapat menurunkan tingkat kemiskinan yang cenderung tinggi.

4.6.4 Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Kemiskinan

Desentralisasi Fiskal (DF) merupakan variabel independen keempat dalam penelitian ini dengan nilai probabilitas sebesar $0.000 < 0.05$ dalam signifikan 5%, dengan nilai koefisien regresi sebesar -2.782. Hal ini menunjukkan bahwa variabel desentralisasi fiskal memiliki pengaruh negatif dan secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan regional di kabupaten/kota Jawa Timur. Berdasarkan kajian teori, bahwa hasil penelitian ini sama dengan hipotesis yang menyatakan bahwa desentralisasi fiskal merupakan variabel yang berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan regional.

Penelitian ini selaras dengan penelitian sebelumnya oleh Hutabarat (2016) menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal memiliki pengaruh negatif dan secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian selanjutnya oleh Laraswati (2017) bahwa secara parsial dan simultan desentralisasi fiskal berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2010 sampai 2015. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin daerah memiliki kemandirian dalam mengelola anggaran untuk daerahnya sendiri maka akan semakin baik dalam memperbaiki pembangunan ekonomi dan akhirnya akan dapat menekan jumlah penduduk miskin yang semakin meningkat. Kebebasan yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam membangun berbagai sektor di suatu daerah merupakan peluang yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat mengurangi jumlah penduduk yang masih tertinggal oleh lingkungan sekitar. Penanggulangan masyarakat yang tertinggal baik dari segi ekonomi maupun sosial pemerintah diharapkan selalu tanggap akan kebutuhan masyarakat untuk mempercepat pembangunan yang tepat sasaran demi kesejahteraan yang lebih baik.

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh dari penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Laju pertumbuhan produk domestik regional bruto tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan regional di Jawa Timur tahun 2016 sampai 2020.
2. Indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan regional di Jawa Timur tahun 2016 sampai 2020.
3. Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan regional di Jawa Timur tahun 2016 sampai 2020.
4. Desentralisasi fiskal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan regional di Jawa Timur tahun 2016 sampai 2020.
5. Berdasarkan hasil analisis regresi oleh data panel variabel independen (Laju pertumbuhan produk domestik regional bruto, IPM, Jumlah penduduk, dan Desentralisasi fiskal) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan regional di Jawa Timur tahun 2016 sampai 2020.

5.2 Implikasi

1. Hasil penelitian diperoleh bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan regional di Jawa Timur tahun 2016 sampai 2020. Dengan demikian, semakin baik pembangunan manusia dalam menunjang seluruh perekonomian, maka akan semakin berhasil dalam mengurangi jumlah penduduk miskin. Hal ini menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia merupakan aspek penting untuk menciptakan sumber daya yang berkualitas dan berintegritas tinggi dalam memperbaiki standar hidup yang lebih layak. Oleh karena itu, pemerintah hendaknya mampu memberikan fasilitas yang memadai seperti kesehatan dan pendidikan untuk memperbaiki indeks pembangunan manusia yang lebih baik.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh positif dan secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan regional di Jawa Timur tahun 2016 sampai 2020. Kepadatan penduduk yang meningkat maka akan berpengaruh pada tingkat kemiskinan yang semakin bertambah pula. Jumlah penduduk yang semakin pesat akan dapat memengaruhi jumlah sumber daya alam yang tersedia, sehingga seiring bertambahnya penduduk yang tidak terkendali maka akan menyebabkan persediaan sumber pangan cenderung sedikit dan langka. Selain itu, peningkatan jumlah penduduk akan dapat memperlambat pembangunan ekonomi dan mempersulit pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan dalam masalah pembangunan di masing-masing daerah.
3. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa desentralisasi fiskal memiliki pengaruh negatif dan secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan regional di Jawa Timur tahun 2016 sampai 2020. Artinya, apabila suatu wilayah semakin mandiri dalam pengelolaan anggaran dari pemerintah pusat dan tidak bergantung pada keuangan yang ditujukan untuk memperbaiki pembangunan daerah maka akan mengurangi laju pertumbuhan ekonomi regional serta kemiskinan akan cenderung menurun sebab kontribusi dana untuk daerah lebih besar dalam mengalokasikan pembangunan. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah pusat dan khususnya pemerintah daerah dapat berupaya meningkatkan pembangunan dengan tujuan untuk pendapatan yang merata seperti hasil panen melalui Badan hukum (BUMDes) maupun hasil ekonomi lainnya untuk kesejahteraan seluruh golongan masyarakat khususnya masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah,k. dan Mursianto, d. (2016). *"The Effects of Fiscal Decentralitation, Economic Growth and Income Inequality on Poverty Rate of Indonesia's 3 Provinces"*. International Journal of Advanced Research, 4(2), 405–414.
- Andhykha, R., Handayani, H. R., & Woyanti, N. (2018). *"Analisis Pengaruh PDRB, Tingkat Pengangguran, dan IPM Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah"*. Media Ekonomi Dan Manajemen, 33(2).
- Anwar, A. (2017). *"Peran Modal Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Jawa"*. Jurnal Economia, Universitas Islam Indonesia, Indonesia, 13(1), pp.79-94.
- Arsyad, L. (2010). *"Ekonomi Pembangunan Edisi ke Empat"*. Penerbit STIE YKPN.Yogyakarta.
- Arya, P. & Finkayana, I. P. A. (2016). *"Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Indikator Impisit IPM Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Bali Tahun 2004 2013"*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, 5(7).
- Badan Pusat Statistik. (2009) *" Indeks Pembangunan Manusia"*. BPS Indonesia
- Badan Pusat Statistik. (2013). *"Definisi Produk Domestik Regional Bruto"*. BPS Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2016). *"Masalah kemiskinan di Indonesia"*. BPS Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2016). *" Persentase Jumlah penduduk miskin Indonesia"*. BPS Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2019).*"Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur"*. BPS Jawa Timur.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *"Jumlah Penduduk Miskin Indonesia"*. BPS Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *"Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan di Indonesia 2020"*. BPS Jawa Timur.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *"Indeks Pembangunan Manusia"*. BPS Jawa Timur.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *"Indikator Kemiskinan dan Pengukuran Kemiskinan"*. BPS Indonesia.

- Badan Pusat Statistik. (2021). *"Jumlah Penduduk Miskin Pulau Jawa"*. BPS Indonesia
- Badan Pusat Statistik. (2021). *"Jumlah Penduduk"*. BPS Jawa Timur
- Badan Pusat Statistik. (2021). *"Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota"*. BPS Jawa Timur
- Badan Pusat Statistik. (2021). *"Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2019-2020"*. Provinsi Jawa Timur: Badan Pusat Statistik Jawa Timur.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *"Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2019-2020"*. Provinsi Jawa Timur: Badan Pusat Statistik Jawa Timur.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *"Jumlah Penduduk miskin"*. BPS Jawa Timur.
- Chamber, R. (2010). *"Paradigms, poverty and adaptive pluralism"*. *IDS Working Papers*, 2010(344), pp.01-57.
- Cholili, F. M. (2013). *"Analisis Pengaruh Pengangguran, PDRB dan IPM terhadap Jumlah Penduduk Miskin (studi kasus: 33 Provinsi di Indonesia)"*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 2(1).
- Dirgantoro, M. A., Mangkuprawira, S., Siregar, H., & Sinaga, B. M. (2009). *"Dampak kebijakan desentralisasi fiskal terhadap transformasi ekonomi di Provinsi Jawa Barat"*. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 5(1). pp.1–9.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2021). *"Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota"*. (dikutip dari <https://djpk.kemenkeu.go.id//portal/data/apbd?tahun=2016&provinsi=13&pemda=16>). diakses pada 26 Oktober 2021.
- Djuuna, R. F., & Widodo, W. (2016). *"Desentralisasi Fiskal dan Ketimpangan Regional di Indonesia Tahun 2004–2013"*. Skripsi Sarjana (Tidak di publikasikan) Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ebel, R. D., & Yilmaz, S. (2002). *"Concept of Fiscal Decentralization and Worldwide Overview"*. Washington, DC: World Bank Institute.
- Enrian, Z. P. (2021). *"Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kemiskinan Di Provinsi Riau Tahun"*

- 2013-2019". Skripsi Sarjana (Tidak di publikasikan) Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Fasholla, T. R. (2018). *"Pengaruh Belanja Daerah, Jumlah Penduduk, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Jumlah Kemiskinan di Kabupaten Cilacap Periode Tahun 2011 – 2016"*. Skripsi Sarjana (Tidak di publikasikan) Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Gujarati, N. D. & Dawn, C. (2013). *"Dasar-dasar Ekonometrika Buku 2"*. Salemba Empat.
- Hapsoro, D. N. Y., & Gunanto, E. Y. A. (2013). *"Analisis Pengaruh Variabel Makroekonomi Regional Terhadap Tingkat Kemiskinan Perkotaan (Studi Kasus 44 Kota di Indonesia Tahun 2007-2010)"*. Diponegoro Journal.
- Haughton, J., & Khandker, S. R. (2012). *"Pedoman tentang kemiskinan dan ketimpangan"*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hutabarat, E. (2016). *"Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Pengeluaran Pemerintah, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan (Studi Kasus Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2002-2013)"*. pp.1–10.
- Ilmi, B. (2021). *"Pengaruh Pdrb, Ipm Dan Tpt Terhadap Kemiskinan Di Lima Provinsi Dengan Tingkat Kemiskinan Tertinggi Di Indonesia Periode 2010-2019"*. Skripsi Sarjana (Tidak di publikasikan) Fakultas Ekonomi IAIN Ponorogo, Jawa Timur.
- Karisma, A. (2013). *"Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Jawa Timur"*. Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE), 1(3).
- Kartomo. (1986). *"Kebijakan Kependudukan dan Ketenagakerjaan di Indonesia"*. Jakarta: Fakultas Ekonomi UI.
- Khasanah, N.A. (2021). *"Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia dan Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah (2013–2019)"*. Skripsi Sarjana (Tidak di publikasikan) Fakultas Ekonomi, UPN Veteran Yogyakarta.

- Kiha, E. K., Seran, S., & Lau, H. T. (2020). "Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran, dan Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Belu". *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 2(07). pp.60–84.
- Kotambunan, L. (2016). "Analisis Pengaruh Belanja Modal dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara (Dalam Tahun 2005-2014)". *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(1).
- Kuncoro, M. (2000). "Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan". AMP YKPN.
- Laraswati, R. (2017). "Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Timur Tahun 2010-2015". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*.
- Nugroho, I., & Dahuri, R. (2004). "Pengembangan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan". Pustaka LP3ES Jakarta.
- Nurwati, N. (2008). "Kemiskinan: Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan". *Jurnal Kependudukan Padjadjaran*, 10(1).
- Putra, D. A. (2015). "Determinan Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur Periode 2009-2013". Skripsi Sarjana (Tidak di publikasikan) Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Pratama, Y. C. (2014). "Analisis faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan di Indonesia". *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 4(2).
- Romi, S., & Umiyati, E. (2018). "Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan upah minimum terhadap kemiskinan di Kota Jambi". *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 7(1). pp.1–7.
- Saragih, J. P., & Khadafi, M. S. (2003). "Desentralisasi fiskal dan keuangan daerah dalam otonomi". *Ghalia Indonesia*.
- Sartika, C., Balaka, M. Y., & Rumbia, W. A. (2016). "Studi Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Masyarakat Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna". *Jurnal Ekonomi Uho*, 1(1).

- Sholikhin, S. (2021). *"The Factors Affecting Poverty Rate in Central Java Province 2018-2020"*. *Eko-Regional: Jurnal Pembangunan Ekonomi Wilayah*, 16(2).
- Sholikhati, M. E. (2020). *"Analisis PDRB, IPM, Jumlah Penduduk, Pengangguran, Investasi PMA Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah 2011-2016"*. *Edusaintek*, 4.
- Subri, M. (2013). *"Ekonomi Sumber Daya Manusia"*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono, A. (1983). *"Pertumbuhan Penduduk dan Masalah Lingkungan Hidup"*. Fakultas Ilmu Keguruan Ilmu Sosial, Ikip Yogyakarta.
- Sukirno, S. (2006). *"Teori Pengantar Makro Ekonomi"*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____(2010). *"Makroekonomi: Teori Pengantar, Edisi Ketiga"*. PT. Raja Grasindo Persada, Jakarta.
- Sudewi, N. N. A., & Wirathi, I. G. A. P. (2013). *"Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan Provinsi Bali"*. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 2(3), 44435.
- Suryawati, C. (2005). *"Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional"*. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 8(03).
- Syamsul, S. (2020). *"Desentralisasi Fiskal dan Tingkat Kemiskinan di Indonesia"*. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Unmul*, 17(1), pp.140-147.
- Todaro, M. P. dan S. C. S. (2004). *"Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Edisi kedelapan."* Jakarta: Erlangga.
- Undang-undang RI No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (dikutip dari (<https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf>))
- Vyasulu, W. M. & V. (2004). *"Desentralisasi demokrasi dan pengurangan kemiskinan di Madhya Pradesh: menemukan keseimbangan kelembagaan, Pembangunan dalam Praktek"*. 14(6), pp.733-740. <https://doi.org/10.1080/0961452042000283969>

- Widodo, A., Waridin, W., & Maria K, J. (2011). "*Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah Di sektor pendidikan dan kesehatan Terhadap pengentasan kemiskinan melalui Peningkatan pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah*". Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, 1(1), pp.1-183.
- Winarendra, A., & Nugroho, S. (2014). "*Analisis Tingkat Kemiskinan dan Faktor-Faktor yang Memengaruhi (Kasus: 35 Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2008-2012)*". Skripsi Sarjana (Tidak di publikasikan) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro, Semarang.
- World Bank. (2019). "*Global Financial Development Report 2019/2020: Bank Regulation and Supervision a Decade after the Global Financial Crisis*". The World Bank
- Wulandari, T. (2018). "*Determinan Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2016*". Skripsi Sarjana (Tidak di publikasikan) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember, Jawa Timur.
- Yustika, A. E. (2006). "*Ekonomi Kelembagaan: definisi, teori, dan strategi*". Malang: Bayumedia Publishing.
- Zuhdiyaty, N., & Kaluge, D. (2017). "*Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kemiskinan Di Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir*". Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia, 11(2). pp.27-31.
- Zurisdah, Z. (2016). "*Pengaruh Tingkat Pengangguran terbuka terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Banten*". Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin, Banten.
- Sumber Internet:
- (www.djpk.kemenkeu.go.id). diakses pada 25 Oktober 2021.
- (www.republika.co.id). diakses pada 31 Oktober 2021.
- (www.kompas.co.id). diakses pada 26 November 2021.
- (www.kumparan.co.id). diakses pada 5 Desember 2021.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Perbandingan Jumlah penduduk miskin menurut kabupaten/kota di provinsi Jawa timur tahun 2016 dan 2020

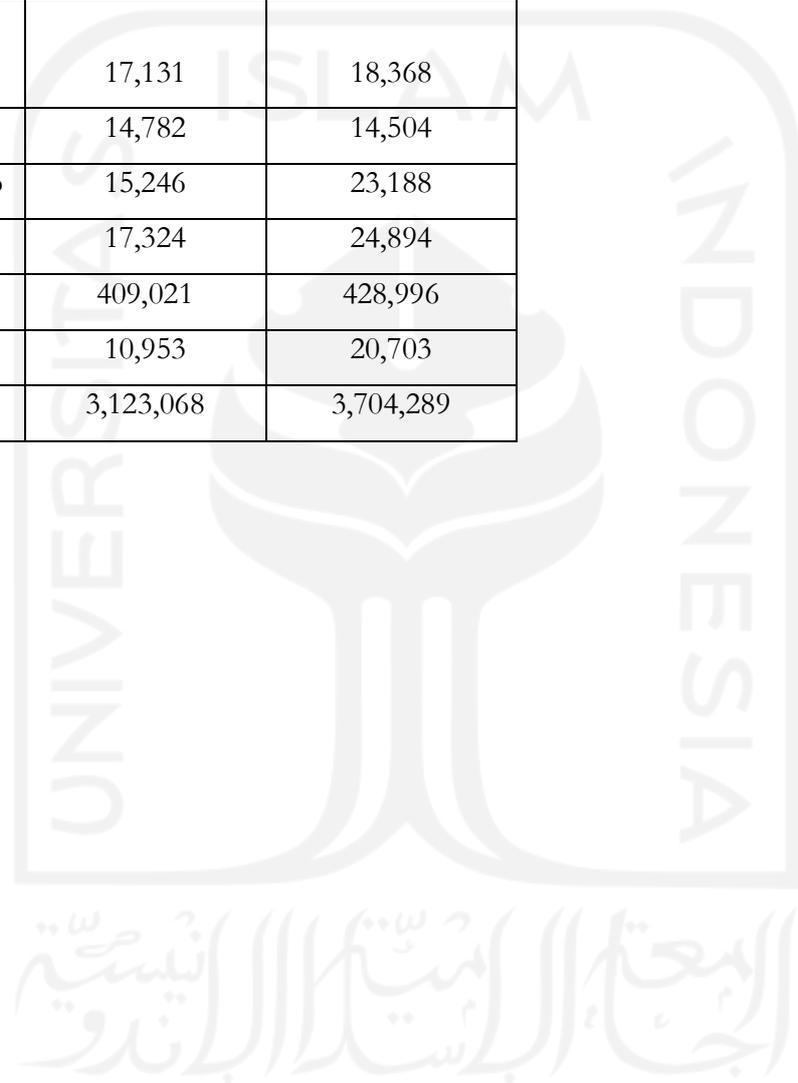
Kab/Kota	2016	2020
Pacitan	85.53	80.82
Ponorogo	102.06	86.74
Trenggalek	91.49	81.06
Tulungagung	84.35	76.4
Blitar	113.51	108.55
Kediri	197.43	179.93
Malang	293.74	265.56
Lumajang	115.91	102.6
Jember	265.1	247.99
Banyuwangi	140.45	130.37
Bondowoso	114.63	110.24
Situbondo	89.68	83.74
Probolinggo	240.47	218.35
Pasuruan	168.06	151.43
Sidoarjo	136.79	127.05
Mojokerto	115.38	118.8
Jombang	133.32	125.94
Nganjuk	127.9	122.73
Madiun	85.97	78.3
Magetan	69.24	65.09
Ngawi	126.65	128.19
Bojonegoro	180.99	161.1
Tuban	198.35	187.13
Lamongan	176.92	164.68
Gresik	167.12	164.05

Bangkalan	205.71	204
Sampang	227.8	224.74
Pamekasan	142.32	129.41
Sumenep	216.14	220.23
Kota Kediri	23.64	22.19
Kota Blitar	9.97	11.1
Kota Malang	37.03	38.77
Kota Probolinggo	18.37	17.72
Kota Pasuruan	14.93	13.4
Kota Mojokerto	7.24	8.09
Kota Madiun	9.05	8.83
Kota Surabaya	161.01	145.67
Kota Batu	9.05	8.12
Jawa Timur	4703.3	4419.1

Lampiran 2: Perbandingan PAD menurut kabupaten /kota di provinsi Jawa timur tahun 2016 dan 2020

Kab/Kota	2016	2020
Pacitan	15,047	16,846
Ponorogo	24,011	30,333
Trenggalek	18,217	25,798
Tulungagung	34,257	50,155
Blitar	22,411	30,254
Kediri	33,911	49,414
Malang	50,275	58,385
Lumajang	24,211	30,026
Jember	52,414	59,318
Banyuwangi	36,787	48,274
Bondowoso	17,703	22,266
Situbondo	17,384	21,885
Probolinggo	22,172	25,488
Pasuruan	48,076	70,015
Sidoarjo	133,528	179,852
Mojokerto	44,762	53,730
Jombang	37,414	46,863
Nganjuk	32,305	40,235
Madiun	16,364	25,821
Magetan	16,562	20,347
Ngawi	19,561	26,998
Bojonegoro	34,041	72,091
Tuban	36,413	56,608
Lamongan	40,347	48,175
Gresik	71,548	92,466
Bangkalan	20,008	23,318
Sampang	13,579	17,552

Pamekasan	17,848	23,226
Sumenep	20,898	17,552
Kota Kediri	23,832	26,289
Kota Blitar	13,192	17,459
Kota Malang	47,754	49,119
Kota Probolinggo	17,131	18,368
Kota Pasuruan	14,782	14,504
Kota Mojokerto	15,246	23,188
Kota Madiun	17,324	24,894
Kota Surabaya	409,021	428,996
Kota Batu	10,953	20,703
Jawa Timur	3,123,068	3,704,289



Lampiran 3: Data observasi Jumlah penduduk miskin, Laju Pertumbuhan Domestik Regional Bruto (LJPDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Jumlah Penduduk (JP), dan Desentralisasi Fiskal (DF) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur 2016-2020.

Kabupaten/Kota	Tahun	Kemiskinan	LJPDRB	IPM	JP	DF
Pacitan	2016	85.53	5.21	65.74	552,307	9.85
Pacitan	2017	85.26	4.98	66.51	553,388	14.02
Pacitan	2018	78.64	5.51	67.33	554,394	10.35
Pacitan	2019	75.86	5.08	68.16	555,304	11.58
Pacitan	2020	80.82	-1.84	68.39	586,110	10.37
Ponorogo	2016	102.06	5.29	68.93	868,814	11.85
Ponorogo	2017	99.03	5.1	69.26	869,894	13.91
Ponorogo	2018	90.22	5.31	69.91	870,705	12.56
Ponorogo	2019	83.97	5.01	70.56	871,370	12.46
Ponorogo	2020	86.74	-0.9	70.81	949,318	13.47
Trenggalek	2016	91.49	5.00	67.78	691,295	11.16
Trenggalek	2017	89.77	5.02	68.1	693,104	14.13
Trenggalek	2018	83.5	5.03	68.71	694,902	12.82
Trenggalek	2019	76.44	5.08	69.46	696,295	14.32
Trenggalek	2020	81.06	-2.17	69.74	731,125	14.09
Tulungagung	2016	84.35	5.02	70.82	1,026,101	13.33
Tulungagung	2017	82.8	5.08	71.24	1,030,790	19.36
Tulungagung	2018	75.23	5.21	71.99	1,035,290	16.77
Tulungagung	2019	70.01	5.32	72.62	1,039,284	17.6
Tulungagung	2020	76.4	-3.09	73	1,089,775	19.3
Blitar	2016	113.51	5.08	68.88	1,149,710	10
Blitar	2017	112.93	5.08	69.33	1,153,803	13.99
Blitar	2018	112.4	5.10	69.93	1,157,500	10.73
Blitar	2019	103.75	5.12	70.57	1,160,677	11.9

Blitar	2020	108.55	-2.29	70.58	1,223,745	13.41
Kediri	2016	197.43	5.02	69.87	1,554,385	14.15
Kediri	2017	191.08	4.9	70.47	1,561,392	19.64
Kediri	2018	177.2	5.08	71.07	1,568,113	16.63
Kediri	2019	163.95	5.07	71.85	1,574,272	15.26
Kediri	2020	179.93	-2.41	72.05	1,635,294	17.43
Malang	2016	293.74	5.30	67.51	2,560,675	14.62
Malang	2017	283.96	5.43	68.47	2,576,596	19.86
Malang	2018	268.49	5.56	69.4	2,591,795	15.3
Malang	2019	246.6	5.5	70.35	2,606,204	15.19
Malang	2020	265.56	-2.68	70.36	2,654,448	15.31
Lumajang	2016	115.91	4.70	63.74	1,033,698	13.14
Lumajang	2017	112.65	5.05	64.23	1,036,823	16.58
Lumajang	2018	103.69	5.02	64.83	1,039,794	13.01
Lumajang	2019	98.88	4.77	65.33	1,042,395	13.56
Lumajang	2020	102.6	-2.79	65.46	1,119,251	13.72
Jember	2016	265.1	5.23	64.01	2,419,000	16.42
Jember	2017	266.9	5.11	64.96	2,430,185	20.67
Jember	2018	243.42	5.23	65.96	2,440,714	16.65
Jember	2019	226.57	5.31	66.69	2,450,668	17.5
Jember	2020	247.99	-2.98	67.11	2,536,729	16.8
Banyuwangi	2016	140.45	5.38	69	1,599,811	13.11
Banyuwangi	2017	138.54	5.45	64.52	1,604,897	14.24
Banyuwangi	2018	125.5	5.84	65.08	1,609,677	15.01
Banyuwangi	2019	121.37	5.55	64.12	1,613,991	15.77
Banyuwangi	2020	130.37	-3.58	65.71	1,708,114	14.77
Bondowoso	2016	114.63	4.97	78.17	765,094	9.1
Bondowoso	2017	111.66	5.03	69.64	768,912	11.9
Bondowoso	2018	110.98	5.10	64.75	772,297	9.7

Bondowoso	2019	103.33	5.29	65.68	775,715	10.13
Bondowoso	2020	110.24	-1.36	64.28	776,151	11.47
Situbondo	2016	89.68	5.00	66.69	673,282	11
Situbondo	2017	88.23	5.07	78.7	676,703	14.1
Situbondo	2018	80.27	5.47	70.06	679,993	10.67
Situbondo	2019	76.44	5.45	65.27	682,978	11.25
Situbondo	2020	83.74	-2.33	66.42	685,967	12.39
Probolinggo	2016	240.47	4.77	64.85	1,148,012	11.24
Probolinggo	2017	236.72	4.46	67.41	1,155,214	14.32
Probolinggo	2018	217.06	4.47	79.5	1,162,092	10.72
Probolinggo	2019	207.22	4.56	70.6	1,168,503	10.2
Probolinggo	2020	218.35	-2.12	66.09	1,152,537	19.14
Pasuruan	2016	168.06	5.44	67.09	1,593,683	17.04
Pasuruan	2017	165.64	5.72	65.6	1,605,307	24.8
Pasuruan	2018	152.48	5.79	68.29	1,616,578	19.27
Pasuruan	2019	141.09	5.83	80.05	1,627,396	19.32
Pasuruan	2020	151.43	-2.03	70.62	1,605,969	21.76
Sidoarjo	2016	136.79	5.51	66.43	2,150,482	36.4
Sidoarjo	2017	135.42	5.81	67.38	2,183,682	41.32
Sidoarjo	2018	125.75	6.02	66.07	2,216,804	38.9
Sidoarjo	2019	119.29	5.99	68.6	2,249,476	38.02
Sidoarjo	2020	127.05	-3.69	80.29	2,082,801	40.77
Mojokerto	2016	115.38	5.49	71.38	1,090,075	20.62
Mojokerto	2017	111.79	5.73	72.36	1,099,504	21.43
Mojokerto	2018	111.55	5.89	72.64	1,108,718	22.44
Mojokerto	2019	108.81	5.81	73.53	1,117,688	21.64
Mojokerto	2020	118.8	-1.11	73.83	1,119,209	22.36
Jombang	2016	133.32	5.40	70.03	1,247,303	16.58
Jombang	2017	131.16	5.36	70.88	1,253,078	20.71

Jombang	2018	120.19	5.44	71.86	1,258,618	17.44
Jombang	2019	116.44	5.06	72.85	1,263,814	17.84
Jombang	2020	125.94	-1.98	72.97	1,318,062	18.46
Nganjuk	2016	127.9	5.29	70.5	1,045,375	15.4
Nganjuk	2017	125.52	5.26	70.69	1,048,799	14.46
Nganjuk	2018	127.28	5.39	71.23	1,051,900	15.26
Nganjuk	2019	118.51	5.36	71.71	1,054,611	14.65
Nganjuk	2020	122.73	-1.71	71.72	1,103,902	16.52
Madiun	2016	85.97	5.27	69.67	677,993	9.47
Madiun	2017	83.43	5.42	70.27	679,888	13.76
Madiun	2018	77.75	5.10	71.01	681,394	11.97
Madiun	2019	71.91	5.42	71.69	682,684	11.77
Madiun	2020	78.3	-1.69	71.73	744,350	14.01
Magetan	2016	69.24	5.31	71.94	627,984	9.92
Magetan	2017	65.87	5.09	72.6	628,609	12.11
Magetan	2018	64.86	5.22	72.91	628,924	10.76
Magetan	2019	60.43	5.04	73.49	628,977	12.26
Magetan	2020	65.09	-1.64	73.92	670,812	11.29
Ngawi	2016	126.65	5.21	68.96	829,480	9.89
Ngawi	2017	123.76	5.07	69.27	829,899	13.81
Ngawi	2018	123.09	5.21	69.91	830,090	10.77
Ngawi	2019	119.43	5.05	70.41	830,108	11.58
Ngawi	2020	128.19	-1.69	70.54	870,057	12.68
Bojonegoro	2016	180.99	21.95	66.73	1,240,383	11.33
Bojonegoro	2017	178.25	10.25	67.28	1,243,906	14.82
Bojonegoro	2018	163.94	4.40	67.85	1,246,927	8.81
Bojonegoro	2019	154.64	6.34	68.75	1,249,692	11.79
Bojonegoro	2020	161.1	-0.4	69.04	1,301,635	17.31
Tuban	2016	198.35	4.90	66.19	1,158,374	16.68

Tuban	2017	196.1	4.98	66.77	1,163,614	20.92
Tuban	2018	178.64	5.17	67.43	1,168,277	18.02
Tuban	2019	170.8	5.14	68.37	1,172,790	19.55
Tuban	2020	187.13	-5.85	68.4	1,198,012	21.95
Lamongan	2016	176.92	5.86	70.34	1,188,193	14.84
Lamongan	2017	171.38	5.5	71.11	1,188,478	15.8
Lamongan	2018	164	5.45	71.97	1,188,913	15.53
Lamongan	2019	157.11	5.44	72.57	1,189,106	16.48
Lamongan	2020	164.68	-2.65	72.58	1,344,165	16.97
Gresik	2016	167.12	5.49	74.46	1,270,702	28.37
Gresik	2017	164.08	5.83	74.84	1,285,018	31.78
Gresik	2018	154.02	5.97	75.28	1,299,024	33.28
Gresik	2019	148.61	5.41	76.1	1,312,881	31.44
Gresik	2020	164.05	-3.68	76.11	1,311,215	31.46
Bangkalan	2016	205.71	0.66	62.06	962,773	10.92
Bangkalan	2017	206.53	3.53	62.3	970,894	14.88
Bangkalan	2018	191.33	4.22	62.87	978,892	9.8
Bangkalan	2019	186.11	1.03	63.79	986,672	11.25
Bangkalan	2020	204	-5.59	64.11	1,060,377	10.89
Sampang	2016	227.8	6.17	59.09	947,614	7.91
Sampang	2017	225.13	4.69	59.9	958,082	13.06
Sampang	2018	204.82	4.56	61	968,520	7.97
Sampang	2019	202.21	1.42	61.94	978,875	9.1
Sampang	2020	142.32	-0.29	62.7	969,694	9.99
Pamekasan	2016	137.77	5.35	63.98	854,194	9.76
Pamekasan	2017	125.76	5.04	64.93	863,004	12.76
Pamekasan	2018	122.43	5.46	65.41	871,497	12.08
Pamekasan	2019	129.41	4.92	65.94	879,992	11.44
Pamekasan	2020	129.41	-2.54	66.26	850,057	12.73

Sumenep	2016	216.14	2.58	63.42	1,076,805	10.15
Sumenep	2017	211.92	2.86	64.28	1,081,204	8.83
Sumenep	2018	218.6	3.63	65.25	1,085,227	8.28
Sumenep	2019	211.98	0.14	66.22	1,088,910	9.79
Sumenep	2020	220.23	-1.13	66.43	1,124,436	9.99
Kota Kediri	2016	23.64	5.54	76.33	281,978	20.2
Kota Kediri	2017	24.07	5.14	77.13	284,002	23.65
Kota Kediri	2018	21.9	5.43	77.58	285,582	19.48
Kota Kediri	2019	20.54	5.47	78.08	287,409	19.92
Kota Kediri	2020	22.19	-6.25	78.23	286,796	21.23
Kota Blitar	2016	9.97	5.76	76.71	139,117	15.57
Kota Blitar	2017	11.22	5.78	77.1	139,995	13.99
Kota Blitar	2018	10.47	5.83	77.58	140,971	10.73
Kota Blitar	2019	10.1	5.84	78.56	141,876	1.77
Kota Blitar	2020	11.1	-2.28	78.57	149,149	1.98
Kota Malang	2016	37.03	5.61	80.46	856,410	27.42
Kota Malang	2017	35.88	5.69	80.65	861,414	29.83
Kota Malang	2018	35.49	5.72	80.89	866,118	27.3
Kota Malang	2019	35.39	5.73	81.32	870,682	26.88
Kota Malang	2020	38.77	-2.26	81.45	843,810	25.11
Kota Probolinggo	2016	18.37	5.88	71.5	231,112	19.33
Kota Probolinggo	2017	18.23	5.88	72.09	233,123	2.24
Kota Probolinggo	2018	16.9	5.94	72.53	235,211	1.78
Kota Probolinggo	2019	16.37	5.94	73.27	237,208	1.83
Kota Probolinggo	2020	17.72	-3.64	73.27	239,649	1.99
Kota Pasuruan	2016	14.93	5.46	74.11	196,202	18.73
Kota Pasuruan	2017	14.85	5.47	74.39	197,696	1.76
Kota Pasuruan	2018	13.45	5.54	74.78	199,078	1.69
Kota Pasuruan	2019	12.92	5.56	75.25	200,422	1.8

Kota Pasuruan	2020	13.4	-4.33	75.26	208,006	1.79
Kota Mojokerto	2016	7.24	5.77	76.38	126,404	18.9
Kota Mojokerto	2017	7.28	5.65	76.77	127,279	2.28
Kota Mojokerto	2018	7.04	5.80	77.14	128,282	2.06
Kota Mojokerto	2019	6.63	5.75	77.96	129,014	2.18
Kota Mojokerto	2020	8.09	-3.69	78.04	132,434	2.62
Kota Madiun	2016	9.05	5.90	80.01	175,607	17.35
Kota Madiun	2017	8.7	5.94	80.13	176,099	2.41
Kota Madiun	2018	7.92	5.96	80.33	176,697	22.91
Kota Madiun	2019	7.69	5.69	80.88	177,007	23.03
Kota Madiun	2020	8.83	-3.39	80.91	195,175	23.49
Kota Surabaya	2016	161.01	6.00	80.38	2,862,406	59.92
Kota Surabaya	2017	154.71	6.13	81.07	2,874,699	64.25
Kota Surabaya	2018	140.81	6.20	81.74	2,885,555	60.83
Kota Surabaya	2019	130.55	6.1	82.22	2,896,195	61.4
Kota Surabaya	2020	145.67	-4.85	82.23	2,874,314	56.86
Kota Batu	2016	9.05	5.23	73.57	202,319	1.36
Kota Batu	2017	8.77	6.56	74.26	203,997	1.76
Kota Batu	2018	7.98	6.50	75.04	205,788	1.65
Kota Batu	2019	7.89	6.52	75.88	207,490	18.57
Kota Batu	2020	8.12	-6.46	75.9	213,046	20.7
Jawa Timur	2016	4703.3	5.57	69.74	39,075,152	29.67
Jawa Timur	2017	4617.01	5.46	70.27	39,292,971	32.28
Jawa Timur	2018	4332.59	5.50	70.77	39,500,851	30.2
Jawa Timur	2019	4112.25	5.52	71.5	39,698,631	30.41
Jawa Timur	2020	4419.1	-2.39	71.71	40,665,696	30.52

Lampiran 4: Hasil Analisis Deskriptif

	KEMISKINAN	LJPDRB	IPM	JP	DF
Mean	227.0421	3.734974	70.93077	2033162	16.5666
Median	119.2900	5.210000	70.54000	1035290	14.32000
Maximum	4703.300	21.95000	82.23000	40665696	64.25000
Minimum	6.630000	-6.460000	59.09000	126404.0	1.360000
Std.Dev	689.0864	3.642507	5.156717	6152286	10.5824
Skewness	5.926653	-0.584633	0.320962	5.900296	2.02826
Kurtosis	36.62368	6.137159	2.487100	36.24253	9.13726
Jarque-Be	10327.30	91.07271	5.485451	10110.1	439.736
Probbaility	0.000000	0.000000	0.064395	0.000000	0.000000
Sum	44273.21	728.3200	13831.50	3.96E+08	3218.780
Sum Sq.D	921189986	2573.965	5158.796	7.34E+15	21725.68
Observation	195	195	195	195	195

الجامعة الإسلامية
الاستاذ الدكتور

Lampiran 5: Hasil Common Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	246.9553	39.18104	6.302930	0.0000
LJPDRB	-0.573242	0.752872	-0.76141	0.4474
IPM	-2.909749	0.566418	-5.13711	0.0000
JP	0.000121	1.01E-06	119.6464	0.0000
DF	-2.971626	0.288392	-10.3041	0.0000
R-squared	0.987921	Mean dependent var		140.5617
Adjusted R-squared	0.987660	S.D. dependent var		340.2648
S.E. of regression	37.79895	Akaike info criterion		10.12840
Sum squared resid	264320.7	Schwarz criterion		10.21385
Log likelihood	-957.1983	Hannan-Quinn criter.		10.16302
F-statistic	3782.671	Durbin-Watson stat		0.478085
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 6: Hasil Fixed Effect Model

Dependent Variable: KEMISKINAN

Method: Panel Least Squares

Date: 11/08/21 Time: 13:52

Sample: 2016 2020

Periods included: 5

Cross-sections included: 38

Total panel (balanced) observations: 190

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	135.9600	46.24033	2.940290	0.0038
LJPDRB	0.024415	0.458372	0.053265	0.9576
IPM	-1.449304	0.659151	-2.198742	0.0294
JP	0.000122	6.76E-07	179.9864	0.0000
DF	-2.723324	0.269855	-10.09179	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.996639	Mean dependent var	140.5617
Adjusted R-	0.995708	S.D. dependent var	340.2648

squared			
S.E. of regression	22.29225	Akaike info criterion	9.238649
Sum squared resid	73547.79	Schwarz criterion	9.956412
Log likelihood	-835.6717	Hannan-Quinn criter.	9.529404
F-statistic	1070.390	Durbin-Watson stat	1.615680
Prob(F-statistic)	0.000000		



Lampiran 7: Hasil Random Effect Model (REM)

Dependent Variable: KEMISKINAN

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 11/08/21 Time: 13:57

Sample: 2016 2020

Periods included: 5

Cross-sections included: 38

Total panel (balanced) observations: 190

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	170.7968	40.92420	4.173492	0.0000
LJPDRB	-0.073475	0.456027	-0.161121	1.8722
IPM	-1.919466	0.580947	-3.304028	0.0011
JP	0.000122	6.65E-07	182.7414	0.0000
DF	-2.781959	0.251950	-11.04170	0.0000

Effects Specification

	S.D.	Rho
Cross-section random	30.48972	0.6517
Idiosyncratic random	22.299225	0.3483

Weighted Statistics

R-squared	0.994885	Mean dependent var	43.68435
Adjusted R-squared	0.994775	S.D. dependent var	310.3981
S.E. of regression	22.43772	Sum squared resid	93138.48
F-statistic	8996.127	Durbin-Watson stat	1.279543
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.987525	Mean dependent var	140.5617
Sum squared resid	272990.9	Durbin-Watson stat	0.436552

Lampiran 8: Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	10.375453	(37,148)	0.0000
Cross-section Chi-square	243.05327	37	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: KEMISKINAN

Method: Panel Least Squares

Date: 11/08/21 Time: 13:54

Sample: 2016 2020

Periods included: 5

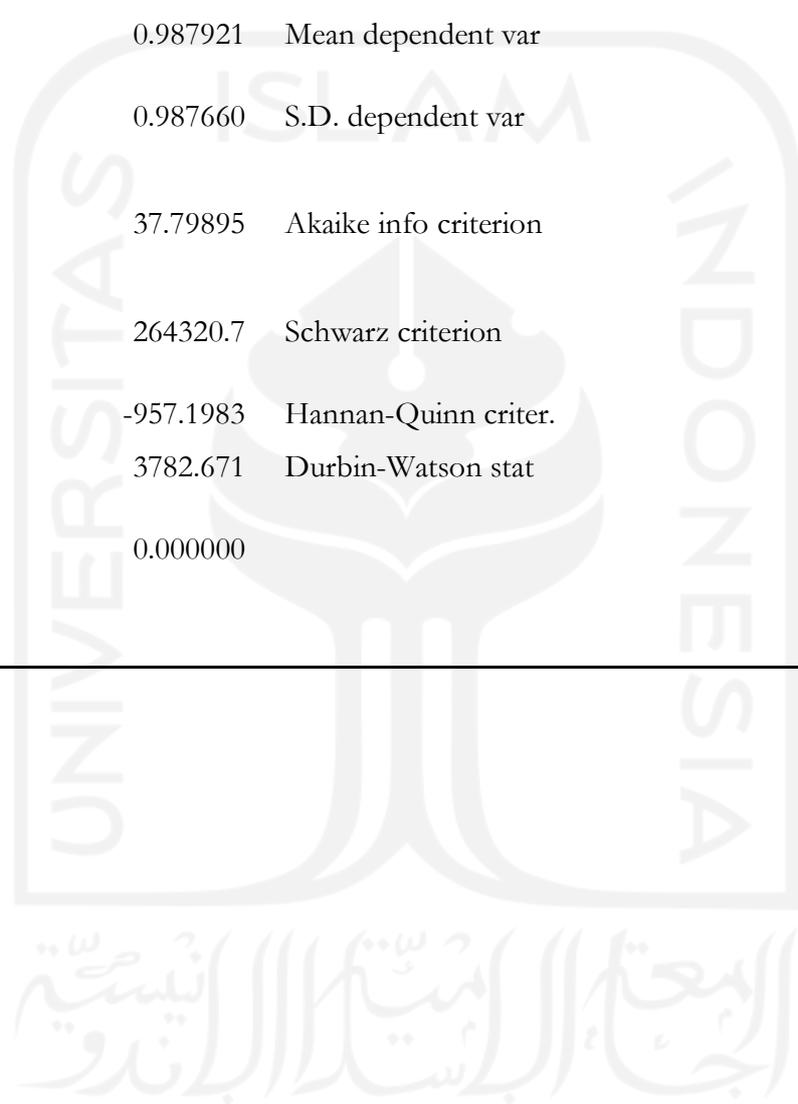
Cross-sections included: 38

Total panel (balanced) observations: 190

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	246.9553	39.18104	6.302930	0.0000
LJPDRB	-5.73E-01	7.53E-01	-0.761408	0.4474

IPM	-2.909749	0.566418	-5.137106	0.0000
JP	0.000121	1.01E-06	119.6464	0.0000
DF	-2.97E+00	2.88E-01	-10.30413	0.0000

R-squared	0.987921	Mean dependent var	140.5617
Adjusted R-squared	0.987660	S.D. dependent var	3402648
S.E. of regression	37.79895	Akaike info criterion	10.1284
Sum squared resid	264320.7	Schwarz criterion	10.21385
Log likelihood	-957.1983	Hannan-Quinn criter.	10.16302
F-statistic	3782.671	Durbin-Watson stat	0.478085
Prob(F-statistic)	0.000000		



Lampiran 9: Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	6.422285	4	0.1698

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
LJPDRB	0.024415	-0.073475	0.002144	0.0345
IPM	-1.449304	-1.919466	0.096980	0.1311
JP	0.000122	0.000122	0.000000	0.2916
DF	-2.723324	-2.781959	0.009343	0.5441

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: KEMISKINAN

Method: Panel Least Squares

Date: 11/08/201Time: 13:58

Sample: 2016 2020

Periods included: 5

Cross-sections included: 38

Total panel (balanced) observations: 190

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	135.9600	46.24033	2.940290	0.0038
LJPDRB	0.024415	0.458372	0.053265	0.9576
IPM	-1.449304	0.659151	-2.198742	0.0294
JP	0.000122	6.76E-07	179.9864	0.0000
DF	-2.723324	0.269855	-10.09179	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.996639	Mean dependent var	140.5617
Adjusted R-squared	0.995708	S.D. dependent var	340.2648
S.E. of regression	22.29225	Akaike info criterion	9.238649
Sum squared resid	73547.79	Schwarz criterion	9.956412
Log likelihood	-835.6717	Hannan-Quinn criter.	9.529404

F-statistic	1070.390	Durbin-Watson stat	1.615680
Prob(F-statistic)	0.000000		



Lampiran 10: Hasil Uji Lagrange Multiple (LM)

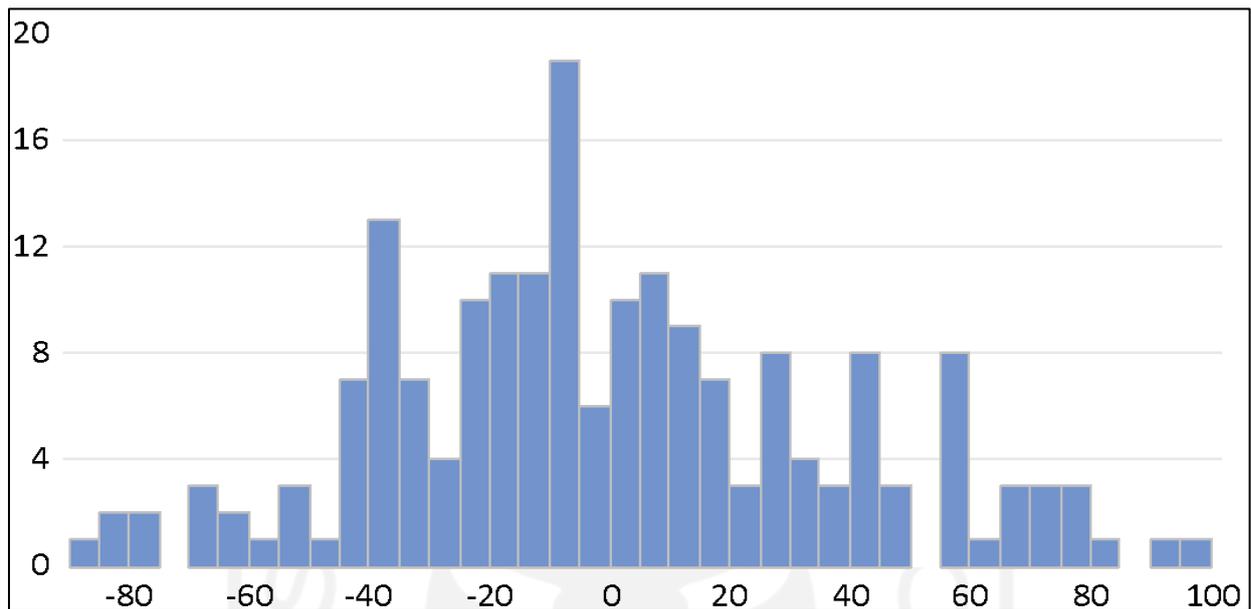
Lagrange Multiple Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two ided (Breusch-Pagan) and one ided
(all others) alternatives

	Test Hypotheses		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	149.8341 (0.0000)	0.01252 (0.9109)	149.8466 (0.0000)
Honda	12.24067 (0.0000)	0.1119 (0.4555)	8.734588 (0.0000)
King-Wu	12.24067 (0.0000)	0.1119 (0.4555)	3.929645 (0.0000)
Standardized Honda	12.69704 (0.0000)	0.84968 (0.1978)	5.442336 (0.0000)
Standardized King Wu	12.69704 (0.0000)	0.84968 (0.1978)	1.868216 (0.03009)
Gourieroux,et al.			149.8466 (0.0000)

Lampiran 11: Hasil Uji Normalitas



Mean	Median	Maximum	Minimum	Std.Dev.	Skewness	Kurtosis	Jarque-Bera	Probability
1.65E-15	-	95.52448	-89.80305	37.39682	0.220077	2.815898	1.802058	0.406152